



Laporan Perekonomian Provinsi Aceh

MEI 2025

KPw BI Provinsi Aceh

VISI

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia Maju.

MISI

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Kalender Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Mei	Agustus	November	Februari

Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia

Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116

Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku "Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Mei 2025" ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi baik untuk internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan I 2025 tumbuh 4,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 4,15% (yoy). Meski demikian, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tumbuh 4,85% (yoy), maupun nasional sebesar 4,87% (yoy). Dari sisi permintaan, tetap kuatnya perekonomian Aceh ditopang oleh permintaan domestik maupun ekspor. Merespons sisi permintaan, kinerja sisi penawaran tumbuh meningkat terutama Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan Penggalian, LU Perdagangan Besar, serta LU Transportasi dan Pergudangan.
2. Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya 2,17% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi Provinsi Aceh pada triwulan I 2025, terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemberian diskon tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Januari dan Februari 2025.
3. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan upaya bersama dan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sebagai sumber pertumbuhan baru. Strategi pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Aceh perlu diupayakan, hal ini mengingat Provinsi Aceh memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan daerah lain. Potensi keragaman daya tarik wisata alam serta regulasi berprinsip syariah turut memperkuat *branding* pariwisata halal di Provinsi Aceh.
4. Ke depan, perekonomian Provinsi Aceh tetap optimis, capaian kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif masih tetap berlanjut. Sementara itu, laju inflasi diperkirakan berada pada sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$.

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, Mei 2025
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Agus Chusaini
Kepala Perwakilan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xii
BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH.....	1
1.1. GAMBARAN UMUM.....	2
1.2. SISI PERMINTAAN.....	3
1.3. SISI LAPANGAN USAHA.....	6
BAB 2. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH.....	13
2.1. GAMBARAN UMUM.....	14
2.2. KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	14
2.3. KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.....	16
BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....	19
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI.....	20
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI.....	20
3.3. <i>TRACKING</i> INFLASI TRIWULAN IV 2024.....	24
3.4. INFLASI SPASIAL.....	25
3.5. AKTIVITAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) ACEH.....	26
BAB 4. PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM.....	31
4.1. KINERJA PERBANKAN.....	31
4.2. INTERMEDIASI PERBANKAN.....	32
4.3. STRATEGI DALAM MENDORONG PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM DI ACEH.....	35
BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....	37
5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI.....	38
5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI.....	38
5.3. KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB).....	41
5.4. PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO DAN PKH.....	42
BAB 6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN.....	44
6.1. KETENAGAKERJAAN.....	45
6.2. KEMISKINAN.....	46
BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH.....	50
7.1. PROSPEK MAKROEKONOMI.....	51
7.2. PROSPEK INFLASI.....	53
7.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	53
DAFTAR ISTILAH.....	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Triwulan I 2025	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	3
Grafik 1.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Triwulan I 2025	3
Grafik 1.4 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga.....	3
Grafik 1.5 Perkembangan Penumpang Pesawat Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh	4
Grafik 1.6 Perkembangan Pembiayaan Konsumsi	4
Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah.....	4
Grafik 1.8 Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan	4
Grafik 1.9 Pertumbuhan PMTB	5
Grafik 1.10 Perkembangan Pembiayaan Investasi	5
Grafik 1.11 Pertumbuhan Ekspor Barang & Jasa	5
Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Batubara	5
Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh	6
Grafik 1.14 Pertumbuhan Impor Barang & Jasa	6
Grafik 1.15 Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri	6
Grafik 1.16 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan III 2024	6
Grafik 1.17 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	7
Grafik 1.18 Perkembangan Produksi Padi	7
Grafik 1.19 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	7
Grafik 1.20 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan.....	7
Grafik 1.21 Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan	8
Grafik 1.22 Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan	8
Grafik 1.23 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	8
Grafik 1.24 Penyaluran Pembiayaan Sektor Konstruksi	8
Grafik 1.25 Perkembangan Pengadaan Semen	9
Grafik 1.26 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan	9
Grafik 1.27 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan	9
Grafik 1.28 Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	9
Grafik 1.29 Perkembangan Penumpang Pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda	10
Grafik 1.30 Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	10
Grafik 1.31 Perkembangan Penggunaan Listrik Industri	10
Grafik 1.32 Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan	10
Grafik 1.34 Pertumbuhan Lapangan Usaha Akmamin	11
Grafik 1.35 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara	12
Grafik 1.36 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar	12
Grafik 2.1 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh	16
Grafik 3.1 Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan I 2025	20
Grafik 3.2 Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit.....	21
Grafik 3.3 Perkembangan Harga Emas Dunia	24

Grafik 3.4 Perkembangan Survei Konsumen	24
Grafik 3.5 Pergerakan Inflasi Kab/Kota IHK di Aceh (% , yoy).....	25
Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank).....	31
Grafik 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga	31
Grafik 4.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek)	31
Grafik 4.4 Perkembangan <i>Non-Performing Financing</i> (Berdasarkan Lokasi Bank).....	32
Grafik 4.5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank).....	32
Grafik 4.6 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek)	32
Grafik 4.7 Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank).....	32
Grafik 4.8 Perkembangan DPK berdasarkan Jenis.....	33
Grafik 4.9 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan.....	33
Grafik 4.10 Perkembangan DPK Perseorangan	33
Grafik 4.11 Perkembangan DPK Pemerintah.....	33
Grafik 4.12 Perkembangan DPK Korporasi	34
Grafik 4.13 Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek).....	34
Grafik 4.14 Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan.....	34
Grafik 4.15 Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha	35
Grafik 4.16 Perkembangan Pembiayaan UMKM	35
Grafik 5.1 <i>Netflow</i> Kas (Rp Triliun)	38
Grafik 5.2 Pertumbuhan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i>	38
Grafik 5.3 Temuan Uang Palsu	38
Grafik 5.4 Perkembangan Nominal SKNBI	39
Grafik 5.5 Perkembangan Volume SKNBI	39
Grafik 5.6 Perkembangan Nominal BI-RTGS	39
Grafik 5.7 Perkembangan Volume BI-RTGS	39
Grafik 5.8 Transaksi ATM Debit	40
Grafik 5.9 Transaksi Kartu Kredit	40
Grafik 5.10 Perkembangan Transaksi UE	40
Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS	41
Grafik 5.12 Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS	41
Grafik 5.13 Transaksi KUPVA BB	41
Grafik 5.14 Disagregasi Transaksi UKA	42
Grafik 5.15 Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)	42
Grafik 5.16 Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)	43
Grafik 5.17 Perkembangan Program Sembako (Nominal)	43
Grafik 5.18 Perkembangan Program Sembako (KPM)	43
Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera	45
Grafik 6.2 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota	47
Grafik 6.3 Penduduk Miskin Provinsi di Wilayah Sumatera	47
Grafik 6.4 Perkembangan Rasio Gini di Aceh	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBD Triwulan I 2025	14
Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan I 2025.....	15
Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan I 2025	16
Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan I 2025	18
Tabel 2.6 Data Realisasi APBD Provinsi Aceh Triwulan I 2025	19
Tabel 2.7 Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan I 2025.....	19
Tabel 3.1 Inflasi Kelompok Barang dan Jasa.....	20
Tabel 3.2 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	20
Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	21
Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	21
Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga	22
Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Kesehatan.....	22
Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Transportasi.....	22
Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Keuangan.....	23
Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.....	23
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Pendidikan	23
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	23
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	24
Tabel 3.13 Andil Inflasi di Kota Banda Aceh	25
Tabel 3.14 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe	25
Tabel 3.15 Andil Inflasi di Kota Meulaboh	26
Tabel 3.16 Andil Inflasi di Aceh Tamiang	26
Tabel 3.17 Andil Inflasi di Aceh Tengah	26
Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	45
Tabel 6.2 Perkembangan TPT.....	45
Tabel 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor	45
Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Pendidikan.....	46
Tabel 6.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan	46
Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani	46
Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	48
Tabel 6.8 Indeks Kemiskinan	48
Tabel 7.1 <i>Global Economic Growth Outlook</i>	50

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

A. PDRB

PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp Triliun)

Sektoral (Rp Triliun)	2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,80	10,19	10,03	11,61	10,49	9,83	10,07	11,74	10,58
Pertambangan dan Penggalian	2,47	2,57	2,72	2,57	2,62	3,01	2,91	2,95	3,11
Industri Pengolahan	1,49	1,60	1,61	1,67	1,56	1,62	1,66	1,71	1,65
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	3,15	3,20	3,56	4,11	3,27	3,47	3,78	4,11	3,27
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,74	5,56	5,69	6,27	5,83	5,84	5,92	6,27	6,18
Transportasi dan Pergudangan	2,34	2,49	2,47	2,43	2,59	2,88	2,95	2,94	2,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,53	0,55	0,56	0,59	0,55	0,55	0,59	0,59	0,58
Informasi dan Komunikasi	1,63	1,63	1,62	1,63	1,64	1,65	1,70	1,64	1,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,56	0,37	0,37	0,57	0,56	0,57	0,59	0,57	0,56
Real Estate	1,48	1,48	1,62	1,52	1,56	1,56	1,62	1,59	1,57
Jasa Perusahaan	0,23	0,22	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,78	3,25	3,13	3,25	3,03	3,48	3,33	3,49	3,27
Jasa Pendidikan	0,97	1,03	0,97	0,94	0,99	1,04	1,04	1,01	1,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,20	1,26	1,33	1,21	1,13	1,28	1,38	1,33	1,22
Jasa lainnya	0,57	0,61	0,62	0,55	0,57	0,63	0,64	0,60	0,60
PDRB	35,01	36,09	36,61	39,23	36,70	37,72	38,50	40,85	38,28

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (% , yoy)

Sektoral Growth (% , yoy)	2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,75%	5,66%	7,70%	8,54%	7,04%	-3,55%	0,38%	1,11%	0,91%
Pertambangan dan Penggalian	-6,21%	-5,28%	-1,82%	-6,10%	5,90%	17,24%	6,86%	14,68%	19,02%
Industri Pengolahan	4,40%	-4,90%	-2,89%	-1,97%	4,69%	1,50%	2,92%	2,81%	5,49%
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	4,92%	7,46%	7,94%	8,85%	9,22%	4,86%	4,49%	3,93%	-4,77%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,78%	4,84%	5,31%	2,00%	6,44%	0,31%	0,89%	0,25%	1,14%
Konstruksi	3,60%	7,84%	1,36%	2,65%	3,90%	8,54%	6,02%	0,05%	-0,11%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,72%	5,53%	9,68%	10,23%	1,68%	4,91%	3,96%	-0,02%	5,87%
Transportasi dan Pergudangan	3,77%	10,41%	9,47%	6,27%	10,65%	15,69%	19,46%	21,12%	9,76%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,32%	7,09%	5,38%	9,16%	3,76%	0,97%	6,36%	0,34%	6,26%
Informasi dan Komunikasi	11,08%	8,01%	0,18%	0,90%	0,45%	1,13%	5,36%	0,50%	0,03%
Jasa Keuangan dan Asuransi	-6,89%	-17,30%	-26,95%	5,14%	-0,35%	52,01%	58,69%	0,29%	0,34%
Real Estate	4,06%	3,89%	2,09%	4,72%	5,09%	4,95%	0,10%	4,32%	1,13%
Jasa Perusahaan	4,07%	-5,62%	-2,31%	-0,02%	2,79%	6,77%	7,38%	0,54%	0,60%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,66%	6,81%	-5,78%	-0,39%	9,08%	7,17%	6,39%	7,48%	7,81%
Jasa Pendidikan	2,18%	7,76%	6,76%	-8,47%	1,72%	1,65%	6,76%	7,71%	0,73%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,58%	-2,02%	8,69%	-3,48%	-5,74%	1,39%	3,70%	9,40%	7,99%
Jasa lainnya	5,75%	9,14%	8,49%	-0,81%	0,25%	3,10%	4,09%	9,12%	4,69%
PDRB	4,64%	4,37%	3,78%	4,15%	4,82%	4,54%	5,17%	4,15%	4,59%

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran (Rp Triliun)

Komponen (Rp Triliun)	2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
- Konsumsi Rumah Tangga	19,43	19,98	19,99	20,03	20,39	20,83	20,76	20,89	21,41
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,67	0,67	0,67	0,83	0,87	0,75	0,80	0,89	0,86
- Konsumsi Pemerintah	3,39	5,91	5,83	7,17	4,15	6,36	6,19	8,10	4,48
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	11,49	11,73	12,01	12,32	11,58	12,49	12,82	13,09	11,57
- Perubahan Inventori	0,37	-0,34	0,42	-0,16	0,32	-0,12	0,13	-0,11	0,67
- Ekspor Luar Negeri	2,06	1,60	1,24	1,34	18,05	18,21	21,61	23,73	22,34
- Impor Luar Negeri	0,33	0,13	0,30	0,69	18,66	20,78	23,81	25,75	22,94
PDRB	35,01	36,09	36,61	39,23	36,70	37,72	38,50	40,85	38,38

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran (% , yoy)

Komponen (Rp Triliun)	2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
- Konsumsi Rumah Tangga	3,14%	3,31%	4,06%	5,80%	4,93%	4,24%	3,85%	4,32%	4,99%
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	5,14%	4,81%	0,59%	21,88%	29,34%	10,67%	18,95%	7,51%	-1,11%
- Konsumsi Pemerintah	0,86%	10,19%	1,41%	-8,70%	21,10%	6,89%	5,36%	12,44%	7,99%
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,52%	7,82%	5,46%	4,76%	0,77%	6,36%	5,95%	5,49%	-0,11%
- Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ekspor Luar Negeri	-0,32%	12,31%	18,02%	17,75%	10,14%	-3,74%	7,68%	11,31%	23,75%
- Impor Luar Negeri	-0,52%	12,35%	19,41%	12,71%	11,59%	-0,37%	5,75%	14,91%	22,94%
PDRB	4,64%	4,37%	3,78%	4,15%	4,82%	4,54%	5,17%	4,15%	4,59%

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

B. Inflasi

Inflasi ⁴ (% , yoy)	2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Banda Aceh	5,32	2,70	1,40	1,53	2,52	2,07	1,84	2,16	1,36
Lhokseumawe	5,35	2,69	2,55	1,56	2,79	2,97	2,11	2,79	1,63
Meulaboh	6,27	2,69	2,10	1,42	4,39	3,94	2,40	3,29	1,46
Aceh Tamiang					3,38	3,14	0,99	1,77	1,28
Aceh Tengah					4,51	4,78	0,47	1,63	2,02
Provinsi Aceh	5,46	2,70	1,83	1,53	3,25	3,09	1,50	2,17	1,53

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

C. Perbankan

Indikator Umum

Indikator	2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Aset (Rp Triliun)	51,04	52,03	53,77	57,84	56,03	57,67	59,99	63,93	61,30
Pertumbuhan (yoy)%	2,35	-1,66	2,26	8,68	9,78	10,85	11,57	10,54	9,41
DPK (Rp Triliun)	38,98	38,86	39,87	41,93	41,39	43,35	44,70	45,67	43,33
Pertumbuhan (yoy)%	1,34	-5,47	0,41	5,78	6,18	11,56	12,11	8,92	4,67
Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)	35,42	36,10	37,48	38,57	39,06	40,80	42,51	43,98	44,49
Pertumbuhan (yoy)%	10,99	10,09	12,07	12,68	10,28	13,04	13,45	14,04	13,89
FDR %	90,87	92,90	94,02	92,00	94,38	94,14	95,14	96,32	102,67
NPF-gross %	1,82	1,96	1,80	1,57	1,68	1,61	1,64	1,79	1,95
NPF-Nominal (Rp Triliun)	0,64	0,71	0,67	0,61	0,66	0,66	0,70	0,78	0,86

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

⁴ SBH 2022

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total (Rp Triliun)	38,98	38,86	39,87	41,93	41,39	43,35	44,70	45,67	43,33
Pertumbuhan (yoy)%	1,34	-5,47	0,41	5,78	6,18	11,56	12,11	8,92	4,67
Giro (Rp Triliun)	6,90	6,73	8,19	5,70	7,92	8,81	10,51	6,00	6,56
Pertumbuhan (yoy)%	-34,94	-27,23	12,33	-9,66	14,71	30,85	28,41	5,15	-17,11
Tabungan (Rp Triliun)	21,55	22,52	22,07	24,99	22,99	24,35	24,19	27,11	25,63
Pertumbuhan (yoy)%	6,27	4,97	3,43	4,33	6,71	8,12	9,60	8,50	11,49
Deposito (Rp Triliun)	10,53	9,61	9,62	11,24	10,48	10,19	10,00	12,56	11,12
Pertumbuhan (yoy)%	38,94	-7,63	-13,23	19,87	-0,47	6,08	3,98	11,76	6,16

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Kredit (Rp Triliun)	35,42	36,1	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52	43,98	44,49
Pertumbuhan (yoy) %	10,99	10,09	12,07	12,68	10,28	13,04	13,45	14,02	13,89
Modal Kerja (Rp Triliun)	6,51	66,14	6,75	6,82	6,52	7,19	7,43	7,29	7,03
Pertumbuhan (yoy)%	-11,27	-12,79	-7,06	0,14	0,05	8,65	10,07	6,89	8,20
Investasi (Rp Triliun)	4,18	4,56	5,25	5,63	5,88	6,30	6,77	7,52	7,74
Pertumbuhan (yoy)%	52,56	53,45	59,27	55,26	40,41	38,20	28,91	33,57	31,62
Konsumsi (Rp Triliun)	14,72	24,92	25,48	26,12	26,67	27,32	28,32	29,16	29,70
Pertumbuhan (yoy)%	13,25	12,1	11,33	9,77	7,87	9,60	11,15	11,63	11,37

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Pinjaman	2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Kredit (Rp Triliun)	48,38	48,97	49,88	49,91	48,66	49,76	51,11	51,87	52,64
Pertumbuhan (yoy) %	2,49	2,65	5,91	1,25	0,57	1,61	2,46	4,66	8,21
Modal Kerja (Rp Triliun)	12,07	12,62	12,47	12,15	11,42	11,77	11,82	12,87	11,52
Pertumbuhan (yoy)%	-13,98	-7,61	1,84	-5,79	-5,42	-6,78	-5,22	1,98	1,02
Investasi (Rp Triliun)	9,75	9,62	10,15	9,82	8,77	8,91	9,23	9,37	9,85
Pertumbuhan (yoy)%	8,80	2,30	5,79	-4,13	-10,16	-7,43	-9,15	-8,53	12,38
Konsumsi (Rp Triliun)	26,55	16,72	27,26	27,94	28,47	29,08	30,06	30,38	31,26
Pertumbuhan (yoy)%	9,69	8,49	7,93	6,83	7,03	8,83	10,29	10,74	9,81

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor (Rp Triliun)	2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian	1,74	1,92	2,20	2,32	2,33	3,01	3,28	3,44	3,50
Perikanan	0,30	0,29	0,30	0,30	0,32	0,31	0,31	0,30	0,28
Pertambangan	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,13	0,11	0,13
Ind, Pengolahan	1,06	1,16	1,24	1,30	1,31	1,34	1,34	1,55	1,48
Listrik, Gas & Air	0,06	0,07	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
Konstruksi	0,51	0,58	0,62	0,62	0,54	0,57	0,54	0,52	0,46
Perdagangan	5,26	5,29	5,47	5,59	5,52	5,77	6,04	6,25	6,21
Hotel & Restoran	0,31	0,35	0,41	0,44	0,47	0,51	0,53	0,56	0,62
Transportasi, Gudang & Kom,	0,21	0,22	0,23	0,26	0,27	0,28	0,31	0,33	0,34
Perantara Keuangan	0,14	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03
Perumahan, usaha sewa & Js, Perusahaan	0,20	0,23	0,23	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	0,27
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
Jasa Kesehatan & Keg, Sosial	0,23	0,24	0,28	0,31	0,31	0,31	0,35	0,37	0,38
Jasa Kemasyarakatan	0,54	0,61	0,71	0,77	0,77	0,81	0,82	0,83	0,82
Jasa Perseorangan	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keg, Yg, Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap, Usaha	24,72	24,93	25,48	26,12	26,67	27,32	28,32	29,16	29,70
Total	35,42	36,10	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52	43,98	44,48

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektor (Rp Triliun)	2023				2024				2025
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian	2,97	3,79	4,05	4,12	4,15	4,58	4,56	4,77	4,79
Perikanan	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32	0,31	0,31	0,28
Pertambangan	3,59	2,47	2,27	2,42	1,48	1,16	1,35	1,81	1,78
Ind, Pengolahan	3,43	4,13	3,97	3,86	4,30	4,43	4,22	3,22	3,70
Listrik, Gas & Air	0,33	0,27	0,33	0,33	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31
Konstruksi	0,78	0,82	0,93	0,92	0,89	0,86	0,94	0,88	0,86
Perdagangan	6,67	6,66	6,85	6,34	6,27	6,48	6,72	6,88	6,90
Hotel & Restoran	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,63	0,65	0,67
Transportasi, Gudang & Kom,	0,30	0,30	0,36	0,38	0,38	0,38	0,36	0,38	0,38
Perantara Keuangan	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
Perumahan, usaha sewa & Js, Perusahaan	2,10	2,01	1,92	1,52	0,26	0,27	0,29	0,30	0,30
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
Jasa Kesehatan & Keg, Sosial	0,25	0,26	0,29	0,32	0,32	0,33	0,36	0,38	0,39
Jasa Kemasyarakatan	0,56	0,62	0,73	0,78	0,78	0,82	0,84	0,85	0,84
Jasa Perseorangan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keg, Yg, Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap, Usaha	26,55	26,72	27,26	27,94	28,47	29,08	30,06	30,77	31,26
Total	48,38	48,97	49,88	49,91	48,66	49,76	51,11	51,64	52,64

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi Daerah

Ekonomi Aceh pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 4,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,15% (yoy).

Ekonomi Aceh pada triwulan I 2025 tumbuh 4,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 4,15% (yoy). Meski demikian, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tumbuh 4,85% (yoy), maupun nasional sebesar 4,87% (yoy). Dari sisi pengeluaran, tetap kuatnya perekonomian Aceh ditopang oleh permintaan domestik maupun ekspor. Merespons sisi permintaan, kinerja sisi penawaran tumbuh meningkat terutama Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan Penggalian, LU Perdagangan Besar, serta LU Transportasi dan Pergudangan.

Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi agregat belanja pemerintah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan I 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi agregat belanja dan pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan I 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah pada triwulan laporan mencapai Rp10,90 triliun (13,67%). Sementara itu, realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Aceh pada Triwulan I 2025 sebesar Rp4,30 triliun (9,40%).

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,53% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,17% (yoy).

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian inflasi pada triwulan sebelumnya 2,17% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi Provinsi Aceh pada triwulan I 2025, terutama bersumber dari kebijakan pemberian diskon tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Januari dan Februari 2025. Dengan demikian, capaian inflasi Aceh masih sesuai dengan sasaran target nasional sebesar $2,5\pm 1\%$.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 tetap terjaga.

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 tetap terjaga, hal ini tercermin dari rendahnya *Non Performing Financing* (NPF). Sementara itu, kinerja pembiayaan tercatat tumbuh 12,49% (yoy). Lebih lanjut, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat sebesar 4,67% (yoy). Di sisi lain, rasio pembiayaan untuk UMKM tercatat sebesar 27,94%.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama triwulan I 2025, perkembangan sistem pembayaran konsisten berjalan lancar dalam mendorong perekonomian Provinsi Aceh.

Pada triwulan I 2025, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendorong perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi *net outflow* pada triwulan laporan. Sistem pembayaran non tunai nilai besar mengalami pertumbuhan. Di sisi lain, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan yang diikuti oleh tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan persentase. Namun demikian, dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh masih berada pada urutan ketiga tertinggi, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

Prospek Perekonomian

Perekonomian Aceh pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran angka 4,11-4,51% (yoy).

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,11%-4,51% (yoy) atau melambat dibandingkan angka tahun sebelumnya sebesar 4,66% (yoy). Perlambatan laju pertumbuhan diperkirakan sejalan dengan kondisi global di tengah perang dagang dan tensi geopolitik. Kendati demikian, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh resilien di tengah ketidakpastian global pada kisaran angka 4,6-5,4% (yoy).



BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I 2025 tumbuh 4,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 4,15% (yoy). Kendati demikian, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tumbuh 4,85% (yoy), maupun nasional 4,87% (yoy). Dari sisi pengeluaran, tetap kuatnya perekonomian Aceh ditopang baik oleh permintaan domestik maupun ekspor. Merespons sisi permintaan, kinerja sisi penawaran tumbuh meningkat terutama Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan Penggalian, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Transportasi dan Pergudangan.

1.1. Gambaran umum

Perekonomian Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 tumbuh tinggi dan tetap solid. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Provinsi Aceh tercatat tumbuh 4,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,15% (yoy). Dari sisi permintaan, tingginya laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Aceh didorong oleh menguatnya kinerja ekspor luar negeri seiring dengan meningkatnya permintaan komoditas ekspor (batu bara dan kopi). Selain itu, permintaan domestik juga meningkat didorong oleh konsumsi selama bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.

Merespons sisi permintaan, kinerja sisi penawaran tumbuh meningkat. Kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan seiring meningkatnya permintaan ekspor. Sementara, meningkatnya konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan dan menjelang HBKN Idul Fitri menjadi pendorong pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Transportasi dan Pergudangan.

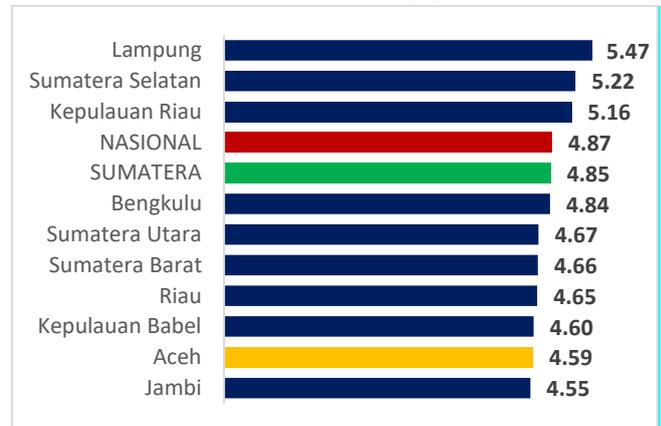
Kinerja Perekonomian Triwulan I 2025

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan angka triwulan sebelumnya. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 4,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,02% (yoy). Sementara itu, ekonomi Sumatera pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 4,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,60% (yoy) (Grafik 1.1).

Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Sumatera, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada periode laporan, ekonomi Provinsi Aceh tumbuh sebesar 4,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,15% (yoy) (Grafik 1.2). Kinerja ekonomi Provinsi Aceh tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan

ekonomi di wilayah Sumatera maupun Nasional.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Triwulan I 2025 (% yoy)



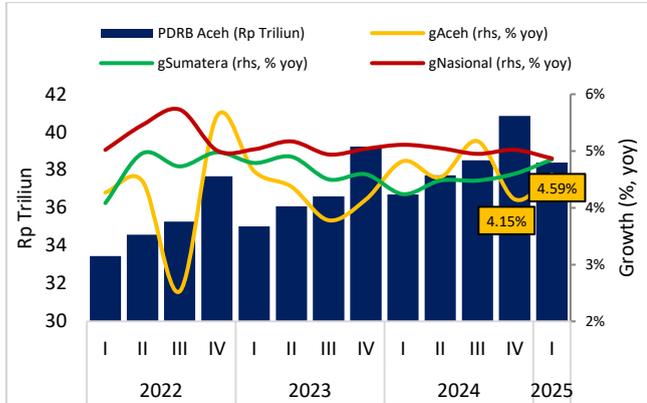
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Dari sisi permintaan, faktor yang menjadi pendorong tingginya pertumbuhan berasal dari meningkatnya kinerja ekspor luar negeri serta tingginya tingkat Konsumsi RT. Menguatnya kinerja ekspor luar negeri didorong oleh berlanjutnya permintaan ekspor batu bara dari India dalam rangka memenuhi target peningkatan produksi baja hingga 300 metrik ton pada tahun 2030. India merupakan pasar terbesar ekspor batu bara Provinsi Aceh dengan pangsa sebesar 87,63% dari total ekspor batu bara. Di sisi lain, tingkat konsumsi RT yang tinggi selama bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri juga turut mendorong laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Aceh.

Sementara dari sisi penawaran, kinerja LU yang terkait ekspor dan konsumsi RT mengalami peningkatan yaitu LU Pertambangan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Transportasi dan Pergudangan. Meningkatnya pertumbuhan pada LU Pertambangan seiring dengan menguatnya kinerja ekspor batu bara dan meningkatnya permintaan oleh India. Di sisi lain, pertumbuhan pada LU Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Transportasi dan Pergudangan didorong oleh meningkatnya permintaan akan barang konsumsi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Pergerakan masyarakat dari dan ke luar

Provinsi Aceh selama HBKN Idul Fitri juga turut mendorong pertumbuhan LU Transportasi lebih tinggi.

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi tersebut, kontribusi Provinsi Aceh terhadap ekonomi Sumatera sebesar 4,91%, sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,99%. Dengan proporsi tersebut, Provinsi Aceh masih menjadi salah satu provinsi dengan perekonomian terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (2,11%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,18%). Sementara itu, Sumatera Utara (23,57%), Riau (23,33%), dan Sumatera Selatan (13,58%) masih menjadi provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Sumatera.

1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh bersumber dari peningkatan kinerja Ekspor Barang dan Jasa, kuatnya Konsumsi Rumah Tangga, dan masih tingginya Konsumsi Pemerintah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ekspor Barang dan Jasa menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi pada sisi permintaan pada triwulan I 2025. Ekspor Barang dan Jasa memberikan andil pertumbuhan sebesar 11,68%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga memberikan andil pertumbuhan yang tinggi sebesar 2,77%, yang turut didorong oleh peningkatan konsumsi selama Ramadhan dan HBKN Idul Fitri (Grafik 1.3).

Grafik 1.3. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Triwulan I 2025

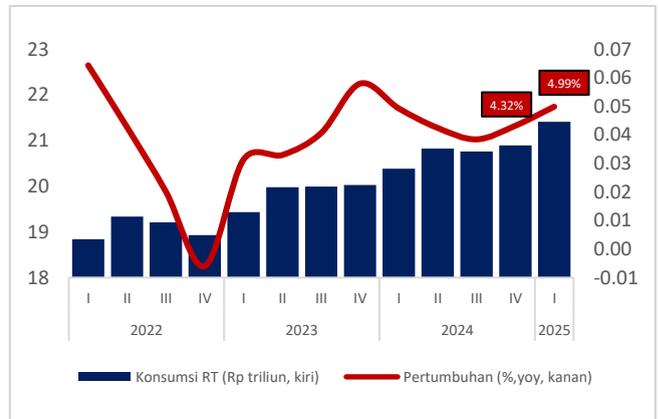


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan I 2025, konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat. Konsumsi rumah tangga pada periode laporan tumbuh sebesar 4,99% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,32% (yoy) (Grafik 1.4). Tingkat pertumbuhan ini membuat konsumsi rumah tangga memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,77%. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, turut didukung oleh tingkat inflasi yang terjaga pada bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.

Grafik 1.4. Pertumbuhan Konsumsi RT



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Beberapa indikator mengkonfirmasi lebih tingginya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Jumlah penumpang pesawat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, dari 291.302 penumpang pada triwulan IV 2024 ke angka 381.436 penumpang pada triwulan I 2025, atau meningkat sebesar 78,29% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 57,75% (yoy) (Grafik 1.5).

Grafik 1.5. Perkembangan Penumpang Pesawat Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh



Sumber: Angkasa Pura II, diolah

Masih kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, turut ditopang oleh masih tingginya pembiayaan konsumsi. Pembiayaan konsumsi pada triwulan I 2025 masih tumbuh kuat sebesar 9,81% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.6).

Grafik 1.6. Perkembangan Pembiayaan Konsumsi

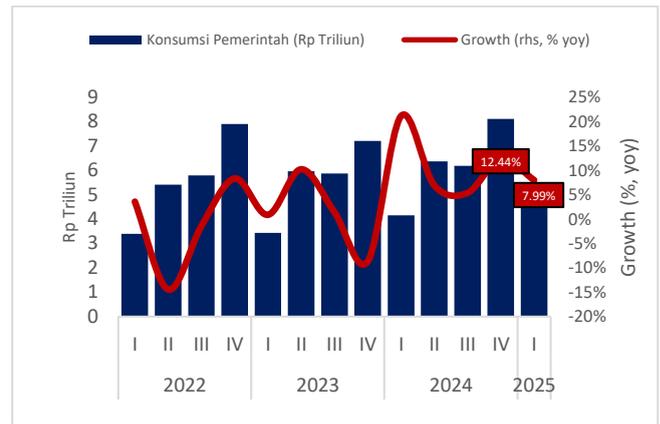


Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah masih tumbuh tinggi. Pada triwulan I 2025, konsumsi pemerintah masih tumbuh positif sebesar 7,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2024 sebesar 12,44% (yoy) (Grafik 1.7). Masih kuatnya kinerja konsumsi pemerintah tercermin dari tingginya realisasi Belanja Operasi sebesar 9,75% dari pagu anggaran atau tumbuh sebesar 10,07% dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu.

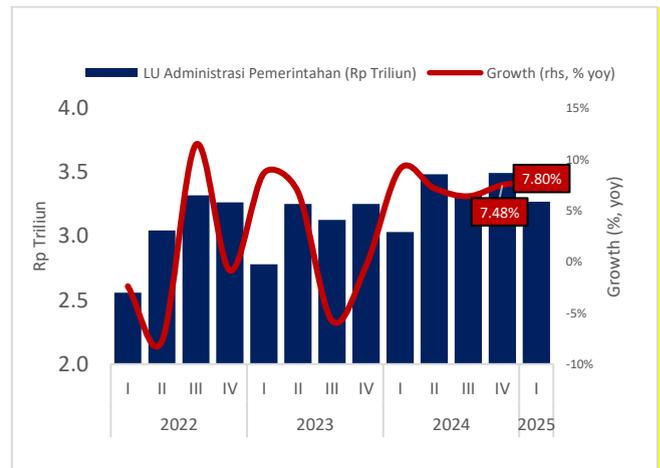
Grafik 1.7. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Masih kuatnya Konsumsi Pemerintah tercermin juga dari kinerja LU Administrasi pemerintah yang mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan realisasi APBD. Realisasi Belanja Daerah per 31 Maret 2025 mencapai 7,60%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,61% (yoy) (Grafik 1.8).

Grafik 1.8. Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pada triwulan I 2025, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Provinsi Aceh tercatat mengalami kontraksi. PMTB Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 terkontraksi sebesar -0,11% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,48% (yoy) (Grafik 1.10). Terkontraksinya PMTB salah satunya dikarenakan oleh menurunnya anggaran Belanja Modal yang tercatat berkurang sebesar -21,78% (yoy) per data 31 Maret 2025, dibandingkan dengan triwulan yang

sama tahun lalu.

Grafik 1.9. Pertumbuhan PMTB



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kendati demikian, pembiayaan investasi pada triwulan laporan tercatat masih tetap tumbuh. Pembiayaan investasi secara nominal mengalami peningkatan dari Rp9,66 triliun pada triwulan IV 2024 menjadi Rp9,85 triliun pada triwulan I 2025. Angka realisasi tersebut tumbuh positif sebesar 12,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,55% (yoy). (Grafik 1.11).

Grafik 1.10. Perkembangan Pembiayaan Investasi



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Ekspor Barang dan Jasa

Kinerja ekspor barang dan jasa Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 tumbuh tinggi, ditopang oleh meningkatnya permintaan batu bara. Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 23,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,31% (yoy) (Grafik 1.12). Perbaikan kinerja ekspor barang dan jasa didukung oleh peningkatan ekspor komoditas utama seperti batubara dan kopi seiring dengan meningkatnya permintaan.

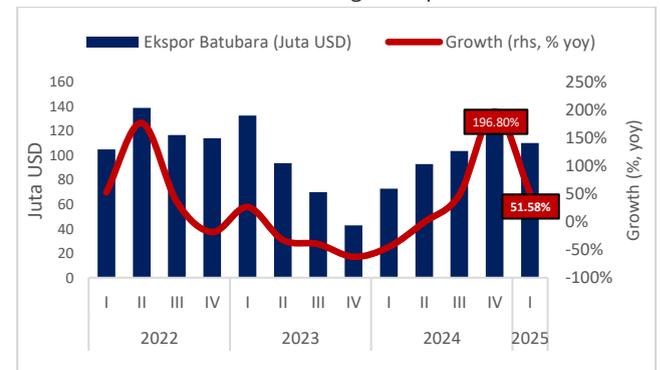
Grafik 1.11. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Ekspor batubara masih menjadi pendorong utama meningkatnya kinerja ekspor barang dan jasa. Pada triwulan I 2025, ekspor barang dan jasa Provinsi Aceh utamanya ditopang oleh ekspor batubara dengan pangsa sebesar 67,92%. Ekspor batubara pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 51,58% (yoy) (Grafik 1.13). Meningkatnya kinerja ekspor batubara sejalan dengan harga batubara yang mengalami penurunan dari USD 76,32/metric ton pada triwulan IV 2024 menjadi USD 76,25/metric ton pada triwulan I 2025. Penurunan harga ini turut mendorong permintaan ekspor, khususnya permintaan dari India sebagai importir utama batubara dari Provinsi Aceh.

Grafik 1.12. Perkembangan Ekspor Batubara

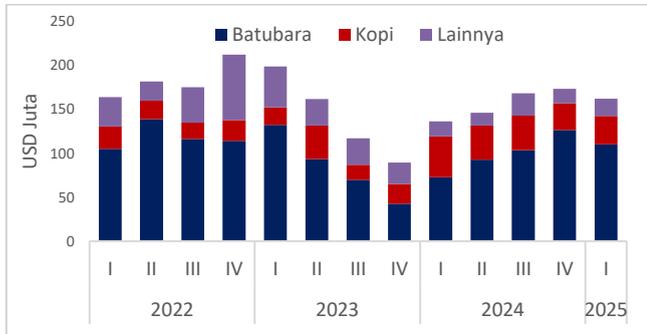


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Ekspor komoditas lainnya juga tercatat mengalami peningkatan. Komoditas ekspor luar negeri Provinsi Aceh terbesar kedua setelah Batubara adalah kopi dengan pangsa 19,87% (Grafik 1.14). Pada triwulan I 2025, ekspor kopi Provinsi Aceh mencapai USD32,21 juta, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD30,33 juta. Sementara itu, ekspor lainnya (pangsa 12,20%) umumnya terdiri dari komoditas rempah-rempah, minyak nabati, pupuk, produk

kimia, dan ikan olahan. Pada periode laporan, ekspor lainnya memberikan nilai ekspor sebesar USD19,78 juta, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar USD16,55 juta.

Grafik 1.13. Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Provinsi Aceh

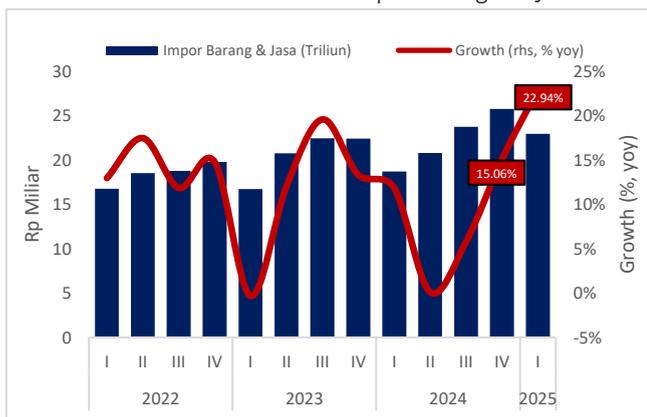


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Impor Barang dan Jasa

Impor barang dan jasa mengalami akselerasi bersumber dari kenaikan impor bahan bakar mineral pada triwulan laporan. Pada triwulan I 2025, impor barang dan jasa tumbuh sebesar 22,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,06% (yoy) (Grafik 1.15). Secara umum, kinerja impor barang dan jasa didominasi oleh impor komoditas gas bumi dengan pangsa mencapai 87,77% dari total impor pada triwulan laporan, disusul oleh komoditas pupuk sebesar 16,23% dari total impor.

Grafik 1.14. Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa

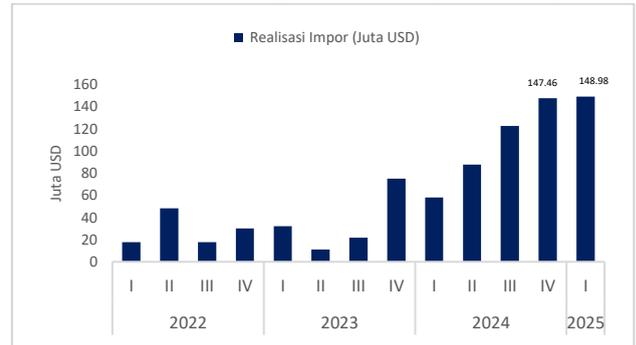


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Impor Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 yang tinggi didorong oleh impor migas. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), nilai impor barang Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 sebesar USD148,98 juta, lebih tinggi dibandingkan

dengan realisasi triwulan sebelumnya sebesar USD147,46 juta. (Grafik 1.16).

Grafik 1.15. Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri

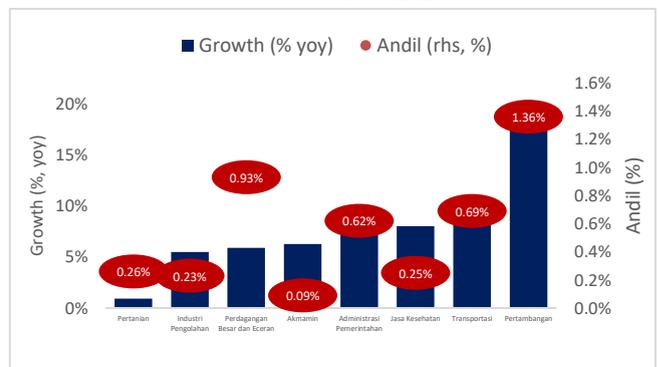


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

1.3. Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi penawaran, pertumbuhan utamanya didorong oleh meningkatnya kinerja LU Pertambangan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Transportasi dan Pergudangan. Pada triwulan laporan LU Pertambangan memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar sebesar 1,36%, LU Perdagangan Besar dan Eceran memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 0,93%, serta disusul oleh LU Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,69% (Grafik 1.17). Sementara itu, LU Pertanian memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 0,26% pada triwulan laporan. Walaupun demikian LU Pertanian masih memiliki pangsa terbesar bagi PDRB Provinsi Aceh sebesar 32,53%, disusul oleh LU Perdagangan sebesar 15,52%, LU Administrasi Pemerintahan sebesar 8,83%, serta LU Konstruksi sebesar 7,80%.

Grafik 1.16. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan I 2025

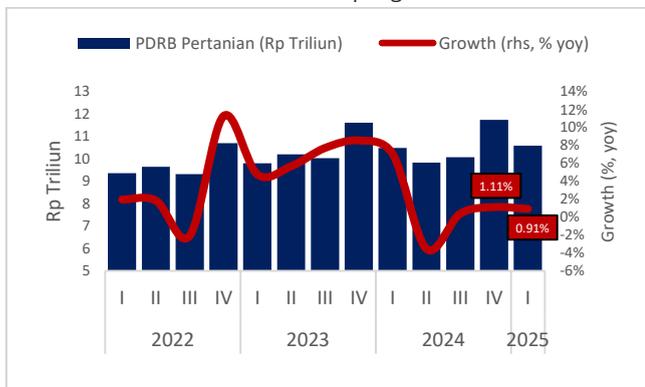


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kinerja LU Pertanian tercatat melambat seiring dengan menurunnya luas panen padi padi, serta penurunan pada Nilai Tukar Petani pada triwulan laporan. LU Pertanian Provinsi Aceh pada triwulan I tumbuh sebesar 0,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,11% (yoy) (Grafik 1.18). Melambatnya LU Pertanian di antara lainnya dikarenakan oleh penurunan luas lahan padi sebesar 11,82 ribu hektare atau turun sebesar 8,34% (yoy).

Grafik 1.17. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Produksi padi pada triwulan I 2025 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, produksi padi di Provinsi Aceh mencapai 426,19 ribu ton GKG, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 524,20 ribu ton GKG. Penurunan ini juga tercermin dari sisi pertumbuhan produksi padi yang terkontraksi sebesar -21,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,76% (yoy) (Grafik 1.19).

Grafik 1.18. Perkembangan Produksi Padi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Melambatnya kinerja LU Pertanian juga tercermin

dari turunnya NTP pada triwulan laporan. NTP pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 120,95 atau terkontraksi sebesar 1,51% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 122,81 (Grafik 1.20). Turunnya nilai NTP ini didorong oleh Peningkatan pada Indeks yang Dibayar Petani (Ib) lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada Indeks yang Diterima Petani (It). Indeks yang Dibayar Petani (Ib) tercatat sebesar 120,10 pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 116,82 atau naik sebesar 2,80%. Sedangkan Indeks yang diterima Petani (It) hanya meningkat dari 117,99 dari triwulan sebelumnya menjadi 119,78 atau meningkat sebesar 1,51%.

Grafik 1.19. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja LU Perdagangan terakselerasi pada triwulan I 2025. Pada triwulan I 2025, LU Perdagangan tercatat tumbuh tinggi sebesar 5,87% (yoy), jauh di atas angka triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,02% (yoy) (Grafik 1.21). Tingginya angka pertumbuhan LU Perdagangan turut didorong oleh peningkatan permintaan selama bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.

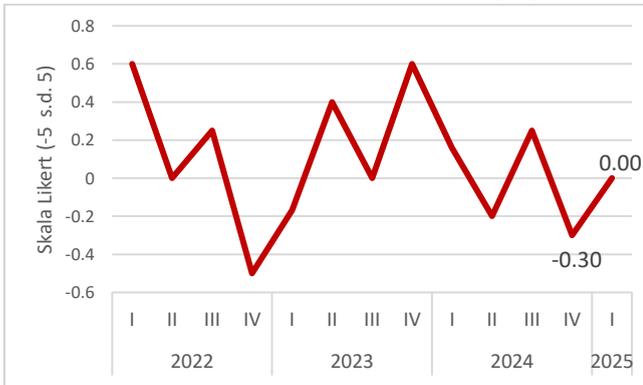
Grafik 1.20. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Meningkatnya kinerja LU Perdagangan, juga tercermin pada hasil *liaison* dunia usaha LU Perdagangan. Pada triwulan I 2025, dunia usaha LU Perdagangan tercatat mengalami peningkatan margin berdasarkan hasil *liaison* perusahaan industri perdagangan. *Liaison* dilakukan menggunakan skala likert di mana angka positif menunjukkan peningkatan margin perusahaan dan angka negatif menunjukkan penurunan margin. Rata-rata nilai skala likert margin keuntungan kontak *liaison* pada triwulan IV tercatat pada angka 0,00 atau meningkat dari posisi triwulan sebelumnya pada angka -0,30.

Grafik 1.21. Perkembangan Margin Berdasarkan Skala Likert Survei *Liaison* Perusahaan Industri Perdagangan



Sumber: *Liaison*, Bank Indonesia

Peningkatan kinerja LU Perdagangan juga tercermin pada pembiayaan LU Perdagangan yang tercatat tetap tinggi. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp6,89 triliun atau tumbuh sebesar 10,02% (yoy). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 8,28% (yoy) dengan pembiayaan mencapai Rp6,87 triliun (Grafik 1.22).

Grafik 1.22. Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2025 tercatat mengalami kontraksi. Pada triwulan I 2025, LU Konstruksi tercatat terkontraksi sebesar -0,11% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,05% (yoy) (Grafik 1.24). Turunnya kinerja LU Konstruksi sejalan dengan terkontraksinya perkembangan pengadaan semen dan pembiayaan sektor konstruksi. Melambatnya LU Konstruksi seiring dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan Belanja Modal pemerintah daerah, serta seiring dengan ketiadaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada triwulan I 2025.

Grafik 1.23. Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pelambatan kinerja LU Konstruksi tercermin dari turunnya realisasi pengadaan semen. Kinerja pengadaan semen pada triwulan laporan tercatat mengalami kontraksi sebesar -20,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -14,65% (yoy) (Grafik 1.24). Kontraksi yang lebih parah dikarenakan minimnya proyek konstruksi besar di Provinsi Aceh seiring dengan turunnya anggaran Belanja Modal

pemerintah.

Grafik 1.24. Perkembangan Pengadaan Semen



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Melambatnya kinerja LU Konstruksi juga tercermin dari masih rendahnya pembiayaan sektor konstruksi. Pada triwulan laporan, nilai pembiayaan Sektor Konstruksi di Provinsi Aceh mencapai Rp0,88 triliun, lebih rendah dibandingkan nominal triwulan sebelumnya sebesar Rp0,86 triliun. Secara tahunan angka pembiayaan triwulan laporan tercatat terkontraksi sebesar atau terkontraksi sebesar -3,56% (yoy), sedikit lebih baik dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -4,44% (yoy) (Grafik 1.25).

Grafik 1.25. Penyaluran Pembiayaan Sektor Konstruksi



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Lapangan Usaha Pertambangan

Kinerja LU Pertambangan pada triwulan I 2025 tumbuh tinggi, seiring dengan meningkatnya permintaan ekspor batubara. Pada triwulan I 2025, LU Pertambangan tercatat tumbuh sebesar 19,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,68% (yoy) (Grafik 1.27). Tingginya pertumbuhan LU Pertambangan sejalan dengan meningkatnya produksi untuk memenuhi

permintaan ekspor batubara.

Grafik 1.26. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan kinerja LU Pertambangan juga ditopang oleh pembiayaan pada sektor tersebut.

Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan sektor tambang tercatat mencapai Rp1,78 triliun atau meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu sebesar 20,32% (yoy). Peningkatan secara tahunan ini lebih baik dibandingkan angka triwulan sebelumnya yang tercatat turun sebesar -25,08% (yoy) (Grafik 1.28).

Grafik 1.27. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Laju pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan I 2025 masih tumbuh positif namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2025, LU Transportasi dan Pergudangan tercatat tetap tumbuh positif sebesar 9,76% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1.29). Masih tumbuhnya LU ini turut didorong oleh peningkatan kebutuhan logistik

dan mobilitas masyarakat selama bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.

Grafik 1.28. Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Bulan Ramadhan dan perayaan HBKN Idul Fitri turut mendorong peningkatan jumlah penumpang pesawat. Pada triwulan I 2025, jumlah penumpang pesawat (berangkat dan datang) di Bandara Sultan Iskandar Muda mencapai 381,4 ribu orang atau tumbuh sebesar 78,29% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 57,75% (yoy) (Grafik 1.30).

Grafik 1.29. Perkembangan Penumpang Pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda



Sumber: Angkasa Pura II, diolah

Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Laju pertumbuhan LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2025 tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2025, LU Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 5,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,81% (yoy) (Grafik 1.31).

Grafik 1.30. Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Meningkatnya angka pertumbuhan LU Industri Pengolahan seiring dengan meningkatnya permintaan ekspor bahan kimia. Pada triwulan I 2025, ekspor bahan kimia tercatat sebesar USD 582,59 Juta atau meningkat secara tahunan sebesar 5,29% (yoy), lebih tinggi dibandingkan peningkatan triwulan sebelumnya sebesar 1,56% (yoy) dengan nominal USD 547,97 Juta (Grafik 1.31).

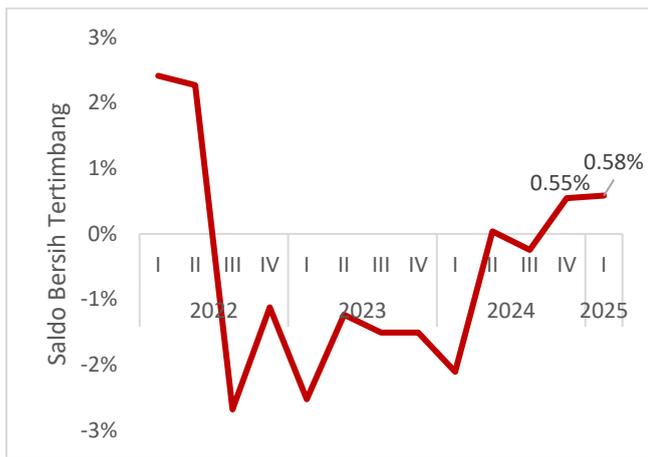
Grafik 1.31. Ekspor Bahan Kimia



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan juga tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) SKDU LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2025 tercatat menjadi 0,58%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,55% (Grafik 1.32).

Grafik 1.32. Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan I 2025 tercatat meningkat.

Pada triwulan I 2025, angka pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman tercatat meningkat sebesar 6,26% (yoy), lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,34% (yoy) (Grafik 1.34). Peningkatan ini turut didorong oleh meningkatnya permintaan selama bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri. Kinerja pada sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman juga tetap meningkat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mengurangi frekuensi perjalanan dinas.

Grafik 1.33. Pertumbuhan Lapangan Usaha Akmamin



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan.

Pada triwulan I 2025, angka kunjungan wisatawan

mancanegara tercatat meningkat dari 9.545 wisatawan pada triwulan sebelumnya menjadi 9.929 wisatawan pada triwulan laporan. Peningkatan secara tahunan tercatat sebesar 4,02% pada triwulan laporan, meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,46% (yoy) (Grafik 1.35).

Grafik 1.34. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara

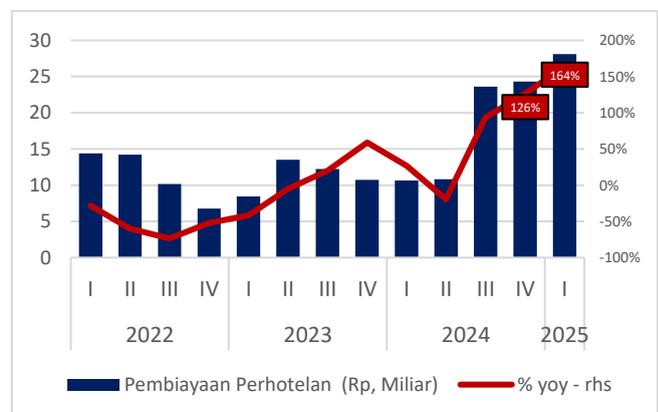


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan pada LU Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman juga tercermin pada usaha perhotelan.

Pada triwulan I 2025, pembiayaan sektor perhotelan tercatat sebesar Rp28,12 Miliar lebih tinggi dibandingkan angka triwulan sebelumnya sebesar Rp24,30 Miliar. Secara tahunan laju pembiayaan perhotelan juga meningkat sebesar 164% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu. Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan laju triwulan sebelumnya sebesar 126% (yoy) (Grafik 1.36).

Grafik 1.35. Perkembangan Pembiayaan Perhotelan



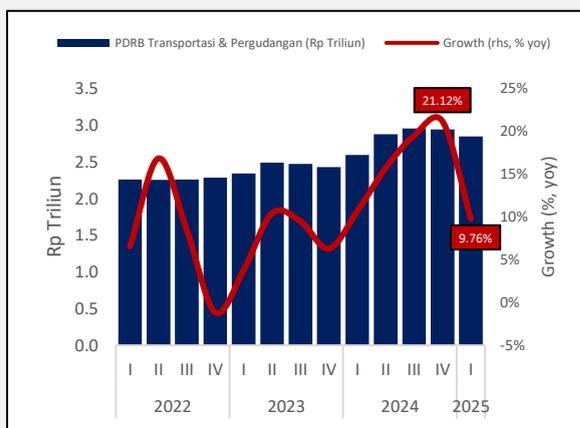
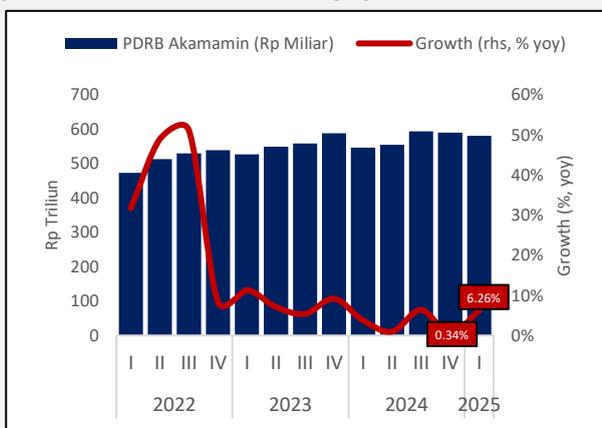
Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi bank, diolah

**PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA ACEH:
“PARIWISATA HALAL SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN BARU”**

Terletak di ujung barat Sumatera dengan luas wilayah 56.839,09 km² dan garis pantai sepanjang 2.667,27, Aceh memiliki kekayaan budaya, keindahan alam yang melimpah, dan sejarah yang panjang. Ada 23 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh yang dengan lebih dari 808 buah objek wisata yang telah terdata dan telah dikembangkan. Objek wisata tersebut terdiri dari 426 objek wisata alam, 268 objek wisata budaya, dan 114 objek minat khusus. Keseluruhan objek wisata tersebut memiliki nilai jual dan daya tarik tersendiri. Berlimpahnya keindahan alam, budaya, dan sejarah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

Kendati potensinya yang besar, pada saat ini sektor pariwisata belum mendominasi perekonomian Aceh secara umum. Hal ini tecermin pada rendahnya *share* Lapangan Usaha (LU) yang terkait dengan pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) Aceh. Pada triuwlan I 2025, LU Jasa Akomodasi, Makanan dan Minuman hanya berkontribusi sebesar 1,65% dari total PDRB dan LU Transportasi dan Pergudangan berkontribusi sebesar 7,80%. Angka tersebut termasuk kecil, jika dibandingkan dengan LU utama di Aceh seperti LU Pertanian dan LU Perdagangan yang berkontribusi masing-masing sebesar 32,53% dan 15,52%.

Pada triuwlan I 2025, sektor pariwisata di Aceh tercatat mengalami peningkatan, hal ini tercermin pada LU yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti LU Penyedia Akomodasi, Makan dan Minum (Akmamin) dan LU Transportasi. LU Akmamin tercatat tumbuh sebesar 6,26% (yoy), sedangkan LU Transportasi tercatat tumbuh sebesar 9,76% (yoy). Selain dari itu, peningkatan pada sektor pariwisata juga tercermin pada peningkatan indikator lainnya seperti jumlah penumpang pesawat pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh (tumbuh 78,29% yoy), jumlah wisatawan mancanegara (tumbuh 4,02% yoy), serta pembiayaan sektor perhotelan (tumbuh 164% yoy).



Grafik Pertumbuhan LU Akmamin dan LU Transportasi,

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Selain itu, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam pengembangan pariwisata di Aceh seperti minimnya fasilitas baik utama maupun pendukung sehingga mengurangi minat wisatawan untuk mengunjungi Aceh. Sebagai contoh, hanya terdapat 41 hotel bintang yang tersebar di beberapa kabupaten/kota dengan konsentrasi terbesar berada di Kota Banda Aceh sebanyak 20 hotel. Namun, terdapat 11 kabupaten/kota lainnya yang tidak memiliki hotel bintang sama sekali, seperti Sabang, Simeuleu, dan Bener Meriah. Ketimpangan ini mengindikasikan tantangan serius dalam pengembangan infrastruktur perhotelan di sektor pariwisata Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan jumlah hotel berbintang dengan dorongan investasi dari luar Aceh, serta peningkatan kualitas fasilitas dan SDM dapat dilakukan untuk meningkatkan peran sektor pariwisata pada PDRB Aceh dan turut mendorong angka pertumbuhan perkenomian Aceh.

--000--



BAB II

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi agregat belanja dan pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan I 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah pada triwulan laporan mencapai Rp10,90 triliun (13,67%). Sementara itu, realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Aceh pada Triwulan I 2025 sebesar Rp4,30 triliun (9,40%).

2.1. Gambaran Umum

Secara nominal, realisasi agregat Belanja Pemerintah di Provinsi Aceh sampai dengan triwulan I 2025 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan I 2025, agregat belanja pemerintah (APBN + APBD) mencapai Rp10,90 triliun, menurun dibandingkan realisasi di tahun sebelumnya sebesar Rp12,67 triliun. Berdasarkan realisasi tersebut, belanja pemerintah lebih rendah sebesar -13,95% (yoy) pada periode laporan. Penurunan ini didorong oleh lebih rendahnya realisasi belanja APBN di Provinsi Aceh. Namun demikian, jika dibandingkan terhadap pagu anggaran, realisasi Belanja Pemerintah pada triwulan I 2025 telah mencapai 13,67%, lebih tinggi dari triwulan I 2024 sebesar 12,99%, didorong oleh realisasi APBD yang lebih tinggi yaitu dari 7,16% di triwulan I 2024, menjadi 7,60% di triwulan I 2025.

Di sisi lain, realisasi agregat Pendapatan Pemerintah mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi pendapatan pemerintah (APBN + APBD) pada triwulan I 2025 mencapai Rp4,30 triliun, menurun -30,76% dibandingkan triwulan I 2024 yang sebesar Rp6,20 triliun. Penurunan tersebut didorong oleh realisasi pendapatan yang lebih rendah pada APBN maupun APBD. Lebih lanjut, jika dibandingkan terhadap pagu anggaran, realisasi pendapatan pemerintah juga mengalami penurunan. Persentase realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan I 2025 mencapai 9,40%, lebih rendah dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 13,31%.

2.2. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Nilai pagu APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Provinsi Aceh mengalami penurunan. Pada tahun 2025, nilai agregat pagu APBD mencapai Rp39,72 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40,68 triliun. Nilai pagu tersebut turun sebesar 2,37% (yoy). Secara umum, pagu APBD mengalami penurunan utamanya pada

belanja modal dan belanja transfer.

Tabel 2. 1. Realisasi Belanja APBD Triwulan I 2025

	Belanja Operasi	9,75%
	Belanja Modal	0,56%
	Belanja Tidak terduga	0,40%
	Belanja Transfer	3,89%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi belanja APBD di Provinsi Aceh hingga triwulan I 2025 mencapai Rp3,02 triliun atau 7,60% dari total pagu belanja. Persentase realisasi belanja APBD ini lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja di triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 7,16% dari pagu belanja 2025. Berdasarkan realisasi tersebut, belanja APBD tumbuh sebesar 3,61% (yoy) pada periode laporan. Lebih lanjut, dari sisi nominal realisasi belanja APBD juga mengalami peningkatan dari Rp2,91 triliun pada triwulan I 2024 menjadi Rp3,02 triliun pada triwulan I 2025. Peningkatan belanja APBD utamanya didorong oleh peningkatan realisasi pada komponen belanja operasi.

Realisasi belanja APBD di triwulan I 2025 masih ditopang oleh belanja operasi. Pada periode laporan, realisasi belanja operasi mencapai Rp2,68 triliun atau sebesar 9,75% terhadap pagu. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan triwulan I 2024 yang sebesar Rp2,44 triliun atau 8,59% dari total pagu. Belanja operasi berkontribusi sebesar 89% dari total realisasi belanja APBD pada periode laporan. Berdasarkan realisasi tersebut, belanja operasi tumbuh sebesar 10,07% (yoy) pada periode laporan.

Realisasi belanja modal menunjukkan penurunan kinerja. Realisasi belanja modal tercatat hanya sebesar Rp22,35 miliar pada triwulan I 2025 atau menurun sebesar 56,89% dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp51,85 miliar. Di sisi lain, persentase realisasi terhadap pagu dari belanja modal juga menunjukkan penurunan yaitu dari 1,30% di triwulan I 2024 menjadi hanya 0,56% pada triwulan I 2025.

Realisasi belanja tidak terduga juga mengalami penurunan pada periode pelaporan. Belanja tidak

terduga menurun secara persentase realisasi terhadap pagu yaitu dari 2,53% pada triwulan I 2024 menjadi 0,40% pada triwulan I 2025. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pagu dari Rp117,60 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp274,39 miliar pada tahun 2025. Berdasarkan realisasi tersebut, belanja tidak terduga tumbuh sebesar -63,09% (yoy) pada periode laporan. Secara nominal, belanja tidak terduga juga mengalami penurunan dari Rp2,98 miliar di triwulan I 2024 menjadi Rp1,10 miliar pada triwulan I 2025.

Realisasi belanja transfer mengalami penurunan di triwulan I 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja transfer pada periode laporan mencapai Rp308,06 miliar atau 3,89% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut menurun sebesar 26,16% (yoy). Baik dari sisi nominal maupun persentase realisasi, belanja transfer mengalami penurunan dibandingkan triwulan I 2024 dengan realisasi mencapai Rp417,18 miliar atau 5,10% dari pagu anggaran.

Tabel 2. 2. Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan I 2025

	Pendapatan Asli Daerah	8,38%
	Pendapatan Transfer	8,26%
	Lain-Lain	0,24%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Pendapatan APBD secara nominal dan persentase pada triwulan I 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan I 2024. Realisasi pendapatan APBD pada triwulan I 2025 sebesar Rp3,13 triliun atau 8,06% dari pagu pendapatan APBD 2025, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2024 yang terealisasi sebesar Rp4,82 triliun atau 12,20% dari pagu pendapatan APBD 2024. Berdasarkan realisasi tersebut, pendapatan APBD tumbuh sebesar -35,91% (yoy) pada periode laporan.

Pendapatan transfer masih menjadi komponen utama pendapatan APBD. Berdasarkan porsi komponen pendapatan APBD, mayoritas berasal dari pendapatan transfer yang menyumbang 83,37% dari total realisasi pendapatan. Angka ini

lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 82,74%. Pendapatan transfer mencatat realisasi sebesar Rp2,61 triliun atau 8,26% dari pagu pendapatan transfer 2025. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan capaian triwulan I 2024 dengan realisasi sebesar Rp3,98 triliun atau 12,07% dari pagu pendapatan transfer 2024. Realisasi tersebut membuat pendapatan transfer tumbuh sebesar -34,60% (yoy) pada periode laporan. Lebih lanjut, dana perimbangan memberikan realisasi terbesar pada komponen pendapatan APBD dengan realisasi mencapai Rp2,49 triliun, diikuti oleh dana desa dengan realisasi mencapai Rp118,58 miliar.

Grafik 2. 1. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh



Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan penurunan. Pada triwulan I 2025, realisasi PAD mencapai Rp517,17 miliar atau 8,38% dari pagu PAD tahun 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2025 dengan realisasi mencapai Rp806,98 miliar atau 13,34% dari pagu PAD tahun 2025. Realisasi tersebut membuat PAD tumbuh sebesar -34,60% pada periode laporan. Realisasi PAD yang lebih rendah didorong oleh menurunnya realisasi pajak daerah yang tumbuh sebesar -40,35% (yoy), atau menurun dari Rp449,44 miliar pada triwulan I 2024 menjadi Rp268,09 miliar pada triwulan I 2025. Kontribusi PAD mengalami perbaikan menjadi sebesar 16,55% dari total realisasi pendapatan APBD pada triwulan I 2025. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Aceh terhadap Transfer Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. Namun demikian, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan perbaikan pada periode 2019 s.d triwulan I 2025 (Grafik 2.1.)

2.3. Kinerja Anggaran dan Belanja dan Pendapatan Negara

Secara nominal, realisasi belanja dan pendapatan APBN menurun di Provinsi Aceh.

Belanja APBN di Provinsi Aceh pada periode laporan secara persentase mencatatkan realisasi sebesar Rp7,88 triliun (17,84% dari pagu anggaran) menurun dibanding triwulan I 2024 yang sebesar Rp9,75 triliun (18,76% dari pagu anggaran). Realisasi tersebut membuat belanja APBN tumbuh sebesar -19,19% (yoy) pada periode laporan. Di sisi lain, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp1,17 triliun (16,88% dari pagu anggaran), menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,39 triliun (19,44% dari pagu anggaran).

Tabel 2. 3. Realisasi Belanja APBN di Provinsi Aceh pada Triwulan I 2025

	Belanja APBN	20,55%
	Transfer ke Daerah	16,52%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Belanja APBN mengalami penurunan sebesar -27,35% (yoy) atau menurun dari Rp3,86 triliun menjadi Rp2,80 triliun. Realisasi Belanja APBN mencapai 20,55% pada triwulan I 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024 sebesar 19,53%. Penurunan realisasi Belanja APBN utamanya didorong oleh realisasi belanja barang yang menunjukkan penurunan. Belanja barang tumbuh -54,46% (yoy) atau menurun dari Rp1,31 triliun menjadi Rp596,21 miliar pada triwulan I 2025. Penurunan juga terjadi pada belanja modal dengan pertumbuhan mencapai -93,37% (yoy) atau menurun dari Rp550,20 miliar menjadi 36,49 miliar pada periode laporan. Penurunan kedua komponen Belanja APBN tersebut akibat dinamika efisiensi dan adanya pemilu pada tahun lalu. Sementara itu, komponen Belanja APBN paling besar yaitu belanja pegawai dengan proporsi sebesar 76,87% mengalami perbaikan. Nilai belanja pegawai di tahun triwulan I 2025 sebesar Rp2,15 triliun lebih tinggi dibanding triwulan I 2024 yang hanya sebesar Rp1,99 triliun atau tumbuh sebesar 8,31% (yoy).

Sementara itu, komponen Belanja APBN lain yang juga mengalami peningkatan adalah belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial tumbuh sebesar 67,64% (yoy) atau meningkat dari Rp14,46 miliar menjadi Rp36,49 miliar pada periode laporan.

Belanja transfer ke daerah mengalami penurunan.

Secara persentase, realisasi belanja transfer pada periode laporan tercatat sebesar 16,62% dari pagu 2025, lebih rendah dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 18,29%. Secara nominal, belanja transfer triwulan I 2025 mencapai Rp5,08 triliun, menurun sebesar -13,84% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang sebesar Rp5,90 triliun. Penurunan belanja transfer ke daerah terjadi di beberapa komponen yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana desa. Dana bagi hasil mencatat realisasi sebesar Rp109,81 miliar atau turun sebesar 5,39% (yoy). Sementara itu, realisasi dana alokasi umum sebesar Rp3,08 triliun atau turun sebesar 22,87% (yoy). Dana desa juga mengalami penurunan dengan mencatat realisasi sebesar Rp1,10 triliun (-0,38% (yoy)). Di sisi lain, dana transfer khusus terutama dana alokasi khusus nonfisik masih mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar Rp785,98 miliar atau tumbuh sebesar 16,01% (yoy). Pada triwulan laporan, komponen belanja transfer ke daerah belum merealisasikan dana otonomi khusus maupun dan insentif fiskal.

Tabel 2. 4. Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh pada Triwulan I 2025

	Pajak	13,51%
	PNBP	44,86%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Pendapatan APBN yang terdiri penerimaan perpajakan dan PNBPN (Pajak Negara Bukan Pajak) mengalami penurunan.

Pendapatan APBN pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp1,17 triliun, turun sebesar 15,77% (yoy). Penurunan utamanya bersumber dari menurunnya penerimaan pajak dengan realisasi mencapai Rp673,36 miliar atau turun sebesar 32,47% (yoy). Penurunan tersebut mayoritas disebabkan oleh peningkatan restitusi

(pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak) pajak dan Penerimaan PPh. Sementara itu, realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp163,12 miliar, terealisasi sebesar 56,84% dari pagu tahun 2025. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan ini tumbuh positif, didorong oleh kinerja signifikan dari sektor Bea Masuk 182,80% (yoy), Cukai 418% (yoy), dan Bea Keluar 213,85% (yoy) seiring dengan peningkatan kegiatan ekspor dan impor pada periode tersebut. Sementara itu, PNBPN juga mengalami penurunan yaitu sebesar 2,55% (yoy), yaitu dari Rp342,80 miliar pada triwulan I 2024 menjadi Rp334,07 pada triwulan I 2025.

Tabel 2. 6. Data Realisasi APBD Provinsi Aceh Triwulan I 2025

APBD PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Triwulan I (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan I (Rp Miliar)		Persentase Realisasi Triwulan I (%)		Pertumbuhan Realisasi Triwulan I 2024-2025 (%)
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
A. PENDAPATAN DAERAH	39.467,74	38.790,17	4.815,06	3.125,44	12,20	8,06	-35,09
I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.051,32	6.172,72	806,98	517,17	13,34	8,38	-35,91
1. Pajak Daerah	2.511,35	2.664,49	449,44	268,09	17,90	10,06	-40,35
2. Retribusi Daerah	279,73	1.031,20	29,97	80,96	10,71	7,85	170,14
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	378,39	369,79		35,37	-	9,56	
4. Lain-lain PAD yang Sah	2.881,85	2.107,24	327,57	132,75	11,37	6,30	-59,47
II. Pendapatan Transfer	32.999,30	31.554,52	3.984,03	2.605,74	12,07	8,26	-34,60
III. Lain-Lain Pendapatan Daerah	417,12	1.062,93	24,05	2,53	5,77	0,24	-89,48
B. BELANJA DAERAH	40.681,48	39.715,59	2.911,21	3.016,40	7,16	7,60	3,61
I. Belanja Operasi	28.404,58	27.537,79	2.439,20	2.684,89	8,59	9,75	10,07
II. Belanja Modal	3.987,30	3.987,93	51,85	22,35	1,30	0,56	-56,89
III. Belanja Tidak Terduga	117,60	274,39	2,98	1,10	2,53	0,40	-63,09
IV. Belanja Transfer	8.172,00	7.915,48	417,18	308,06	5,10	3,89	-26,16
C. SURPLUS/DEFISIT	- 1.213,74	- 925,42	1.903,85	109,04	- 156,86	- 11,78	-94,27

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional Mei 2025

Tabel 2. 7. Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan I 2025

BELANJA NEGARA (APBN) DI PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Triwulan I (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan I (Rp Miliar)		Persentase Realisasi Triwulan I (%)		Pertumbuhan Realisasi Triwulan I 2024-2025
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
A. PENDAPATAN NEGARA	7.149,07	6.935,88	1.389,72	1.170,55	19,44	16,88	-15,77
I. Penerimaan Perpajakan	6.405,72	6.191,14	1.046,92	836,48	16,34	13,51	-20,10
1. Penerimaan Pajak	6.035,11	5.904,14	997,10	673,36	16,52	11,40	-32,47
2. Kepabeanan dan Cukai	370,61	287,00	49,82	163,12	13,44	56,84	227,42
II. PNBP	743,35	744,74	342,80	334,07	46,12	44,86	-2,55
B. BELANJA NEGARA	51.985,97	44.197,64	9.754,15	7.882,72	18,76	17,84	-19,19
I. Belanja Pemerintah Pusat	19.752,03	13.636,66	3.857,12	2.802,02	19,53	20,55	-27,35
1. Belanja Pegawai	7.868,19	7.855,29	1.988,64	2.153,89	25,27	27,42	8,31
2. Belanja Barang	8.016,83	3.978,62	1.309,06	596,21	16,33	14,99	-54,46
3. Belanja Modal	3.806,08	1.737,59	550,20	36,49	14,46	2,10	-93,37
4. Belanja Bantuan Sosial	60,93	65,16	9,21	15,44	15,12	23,70	67,64
II. Transfer ke Daerah	32.233,94	30.560,98	5.897,03	5.080,70	18,29	16,62	-13,84
1. Dana Bagi Hasil	1.143,35	1.044,49	116,06	109,81	10,15	10,51	-5,39
2. Dana Alokasi Umum	15.901,78	15.332,50	3.997,41	3.083,08	25,14	20,11	-22,87
3. Dana Transfer Khusus	5.723,80	5.078,54	677,53	785,98	11,84	15,48	16,01
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	2.114,83	765,05			0,00	0,00	
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.608,96	4.313,49	677,53	785,98	18,77	18,22	16,01
4. Dana Otonomi Khusus	4.276,99	4.309,58			0,00	0,00	
5. Dana Desa	4.958,90	4.738,17	1.106,03	1.101,83	22,30	23,25	-0,38
6. Dana Insentif Fiskal	229,12	57,70			0,00	0,00	
C. SURPLUS/DEFISIT	-44.836,90	-37.261,76	-8.364,43	-6.712,17	18,66	18,01	-19,75

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional Mei 2025



BAB III

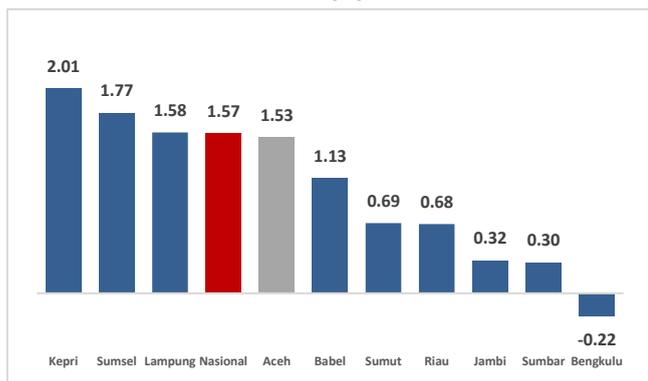
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian inflasi pada triwulan sebelumnya 2,17% (yoy). Menurunnya tekanan inflasi Provinsi Aceh pada triwulan I 2025, terutama bersumber dari kebijakan pemberian diskon tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Januari dan Februari 2025. Untuk keseluruhan tahun 2025, capaian inflasi Aceh masih sesuai dengan sasaran target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$.

3.1. Perkembangan Umum Inflasi

Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Pada periode tersebut inflasi Provinsi Aceh tercatat sebesar 1,53% (yoy) lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yaitu 2,17% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi Nasional (1,03% yoy) namun masih terkendali pada rentang sasaran target inflasi tahun 2025 yaitu sebesar $2,5 \pm 1,0\%$ (yoy) (Grafik 3.1). Masih terkendalinya inflasi pada rentang sasaran target inflasi tahun 2025, tidak terlepas dari upaya yang dilakukan TPID se-Provinsi Aceh yaitu melalui sinergi dan kolaborasi intens dalam rangka pengendalian inflasi melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif).

Grafik 3.1. Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan I 2025 (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

3.2. Analisis Perkembangan Inflasi

Tekanan inflasi pada triwulan I 2025 utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini menjadi kelompok pengeluaran dengan andil inflasi tertinggi yaitu sebesar 0,97%. Andil inflasi tertinggi selanjutnya didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,48%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,28%, serta kelompok transportasi sebesar 0,24%. Sementara itu, laju inflasi ditahan oleh deflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar

rumah tangga dengan andil sebesar -0,42% serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,03%.

Jika dilihat berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2025 diantaranya yaitu emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), tarif air minum PAM, minyak goreng, dan ikan tongkol. Di sisi lain, laju inflasi yang lebih tinggi ditahan oleh komoditas dengan andil deflasi tertinggi yaitu tarif listrik, cabai merah, tomat, telur ayam ras, dan kangkung.

Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

Kelompok Barang dan Jasa	Tw IV 2024		Tw I 2025	
	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,12	1,14	2,57	0,97
Pakaian dan Alas Kaki	0,33	0,02	0,78	0,05
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	2,73	0,43	-2,69	-0,42
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	1,04	0,04	0,60	0,02
Kesehatan	1,16	0,02	1,54	0,03
Transportasi	-1,01	-0,11	0,90	0,09
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,87	-0,03	-0,89	-0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	2,90	0,03	1,06	0,01
Pendidikan	1,36	0,06	1,30	0,05
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,22	0,24	2,68	0,28
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,99	0,33	8,90	0,48
Inflasi Umum	2,17		1,53	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Tabel 3.2. Inflasi Kel, Makanan, Minuman, dan Tembakau

INFLASI 2,57% (yoy)		ANDIL 0,97%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Sigaret Kretek Mesin	0,32	Cabai Merah	0,28
Minyak Goreng	0,24	Tomat	0,20
Ikan Tongkol	0,18	Telur Ayam Ras	0,09
Ikan Dencis	0,16	Kangkung	0,05
Kelapa	0,10		
Ikan Kembung	0,09		

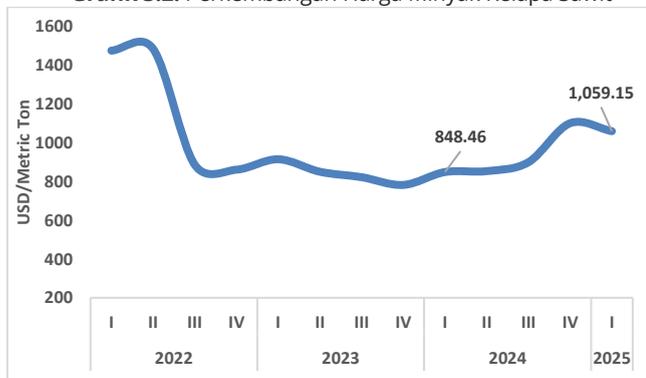
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami

penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada kelompok ini tercatat mengalami penurunan dari 3,12% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 2,57% (yoy) (tabel 3.2). Tekanan inflasi didorong oleh subkelompok rokok dan tembakau sebesar 7,87% (yoy).

Tekanan inflasi terbesar pada kelompok makanan, minuman, berasal dari komoditas SKM dan minyak goreng. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 192/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, Harga Jual Ecerean (HJE) rokok mengalami penyesuaian berdasarkan jenis rokok yang diperdagangkan. Kenaikan tarif cukai berdampak pada berlanjutnya kenaikan harga komoditas rokok dan tembakau yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Sementara itu, harga komoditas minyak goreng yang meningkat didorong oleh peningkatan harga minyak kelapa sawit pada triwulan I menjadi 1.059,15 USD/metric ton, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya sebesar 848,46 USD/metric ton.

Grafik 3.2. Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit



Sumber: Bloomberg, diolah

Sementara itu, terjaganya harga komoditas cabai merah dan tomat mampu menahan laju inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas cabai merah mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,28%, sedangkan tomat mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,20% pada triwulan laporan. Deflasi disebabkan oleh lancarnya pasokan dari daerah penghasil di tengah menurunnya permintaan selama Ramadhan.

Kel. Pakaian dan Alas Kaki

Tabel 3.3. Inflasi Kel. Pakaian dan Alas Kaki

INFLASI 0,78% (yoy)		ANDIL 0,05%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Baju Kaos Tanpa Kerah	0,01	Tidak Dipublikasi	
Baju Muslim Wanita	0,01	Tidak Dipublikasi	
Onkos Jahit	0,01	Tidak Dipublikasi	
Celana Panjang Jeans Pria	0,01	Tidak Dipublikasi	
Sarung	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami peningkatan inflasi pada triwulan I 2025. Kelompok pakaian dan alas kaki tercatat mengalami inflasi sebesar 0,78% (yoy) dengan andil sebesar 0,05% pada triwulan I 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,33% (yoy). Peningkatan inflasi disumbang terutama oleh subkelompok alas kaki sebesar 1,76% (yoy) dan subkelompok pakaian sebesar 0,56% (yoy). Komoditas baju kaos tanpa kerah, baju muslim wanita, ongkos jahit, celana panjang jeans pria, dan sarung memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Peningkatan inflasi tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan komoditas sandang menjelang HBKN Idul Fitri.

Kel. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Tabel 3.4. Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

INFLASI -2,69% (yoy)		ANDIL -0,42%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tarif Air Minum PAM	0,31	Tarif Listrik	-0,90
Kontrak Rumah	0,09		
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,05		

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi pada periode laporan. Pada triwulan I 2025, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat mengalami deflasi sebesar -2,69% (yoy). Tekanan deflasi bersumber dari subkelompok

listrik dan bahan bakar rumah tangga yang mengalmi deflasi sebesar 12,69%. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025.

Sementara itu, tekanan inflasi bersumber dari subkelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya. Subkelompok tersebut tercatat mengalami inflasi sebesar 27,02% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi ini sejalan dengan keputusan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2024 pada Juni 2024 untuk menaikkan tarif air minum PAM sebesar rata-rata 30%. Komoditas tarif air minum PAM memberikan andil inflasi sebesar 0,31%.

Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Tabel 3.5. Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

INFLASI 0,60% (yoy)		ANDIL 0,02%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Lemari Pakaian	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan I 2025, tekanan inflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga mengalami penurunan. Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 0,60% (yoy) dengan andil 0,02%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya 1,04% (yoy). Tekanan inflasi bersumber dari subkelompok furnitur, perlengkapan, dan karpet yang mengalami inflasi sebesar 2,30% (yoy). Di lain sisi, komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar yaitu lemari pakaian dengan andil sebesar 0,01%.

Kel. Kesehatan

Tabel 3.6. Inflasi Kel. Kesehatan

INFLASI 1,54% (yoy)		ANDIL 0,03%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Vitamin	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Laju inflasi kelompok kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,54% (yoy) dengan andil 0,03%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya sebesar 1,16% (yoy). Tekanan inflasi didorong oleh subkelompok jasa kesehatan lainnya dengan tingkat inflasi sebesar 6,15% (yoy). Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar yaitu vitamin dengan andil sebesar 0,01%.

Kel. Transportasi

Tabel 3.7. Inflasi Kel. Transportasi

INFLASI 0,90% (yoy)		ANDIL 0,09%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Mobil	0,09	Tidak Dipublikasi	
Motor	0,03	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Inflasi pada kelompok transportasi lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kelompok transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 0,90% (yoy) dengan andil sebesar 0,09%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi sebesar -1,01% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi kelompok transportasi utamanya didorong oleh subkelompok pembelian kendaraan yang mengalami inflasi sebesar 6,11% (yoy). Sementara itu, komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar yaitu mobil dengan andil 0,09% dan motor dengan andil sebesar 0,03%. Hal ini didorong oleh kebijakan opsen dua pajak baru mulai 5 Januari 2025. Pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Selain itu, kenaikan inflasi pada kelompok ini juga didorong oleh penyesuaian harga kendaraan di tengah perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari

11% menjadi 12% khususnya untuk kendaraan yang telah dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebelumnya.

Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Tabel 3.8. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

INFLASI -0,89% (yoy)		ANDIL -0,03%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tidak Dipublikasi		Telepon Seluler	0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, tercatat kembali mengalami deflasi pada periode triwulan I 2025. Kelompok ini tercatat mengalami deflasi sebesar 0,89% (yoy) dengan andil deflasi 0,03%, stabil dengan triwulan sebelumnya yang juga mengalami deflasi sebesar 0,87% (yoy). Deflasi bersumber dari subkelompok peralatan informasi dan komunikasi dengan deflasi sebesar 3,94% (yoy). Komoditas telepon seluler berkontribusi terhadap angka deflasi dengan andil 0,03%.

Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Tabel 3.9. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

INFLASI 1,06% (yoy)		ANDIL 0,01%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Buku Tulis Bergaris	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan I 2025, inflasi kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 1,06% (yoy) dengan andil 0,01%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,90% (yoy). Inflasi yang terjadi pada kelompok ini disebabkan oleh subkelompok koran, buku, dan perlengkapan sekolah yang tercatat mengalami inflasi sebesar 2,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,53% (yoy). Sementara, komoditas yang menjadi pendorong inflasi yaitu buku tulis bergaris dengan andil sebesar 0,01 persen.

Kel. Pendidikan

Tabel 3.10. Inflasi Kel. Pendidikan

INFLASI 1,30% (yoy)		ANDIL 0,05%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Akademi/Perguruan Tinggi	0,02	Tidak Dipublikasi	
Sekolah Dasar	0,02	Tidak Dipublikasi	
Taman Kanak-kanak	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Inflasi kelompok pendidikan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2025, kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 1,30% (yoy) dengan andil 0,05%, lebih dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,36% (yoy). Inflasi pada kelompok pendidikan utamanya bersumber dari peningkatan biaya pendidikan yang terjadi tiap tahunnya.

Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Tabel 3.11. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

INFLASI 2,68% (yoy)		ANDIL 0,28%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Kopi Siap Saji	0,07	Tidak Dipublikasi	
Nasi Dengan Lauk	0,05	Tidak Dipublikasi	
Bakso Siap Santap	0,05	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Laju Inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,68% (yoy) dengan andil 0,28%, lebih tinggi dari inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,22% (yoy). Pada triwulan I 2025 tekanan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman yang mengalami inflasi sebesar 2,68% (yoy). Sementara itu, komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini yaitu kopi siap saji dengan andil sebesar 0,07%, diikuti oleh komoditas nasi dengan lauk dan bakso siap santap dengan andil masing-masing sebesar 0,05%.

Kel. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Tabel 3.12. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

INFLASI 8,90% (yoy)		ANDIL 0,48%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Emas Perhiasan	0,46	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi yang lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan pelaporan, inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat sebesar 8,90% (yoy) dengan andil sebesar 0,48% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,99% (yoy). Pendorong inflasi terutama berasal dari subkelompok perawatan pribadi lainnya yang mengalami peningkatan inflasi sebesar 24,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,41% (yoy).

Komoditas emas perhiasan menjadi pendorong utama inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Andil komoditas ini mencapai 0,46% pada periode pelaporan. Kenaikan harga emas perhiasan dorong oleh tren peningkatan harga emas global karena meningkatnya tekanan geopolitik di Timur Tengah dan ekspektasi pelaku pasar terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat untuk menurunkan suku bunga. Harga emas dunia di triwulan I 2025 berada pada level USD2.862/ounce, mengalami peningkatan sebesar 38,14% (yoy) (Grafik 3.3).

Grafik 3.3. Perkembangan Harga Emas Dunia

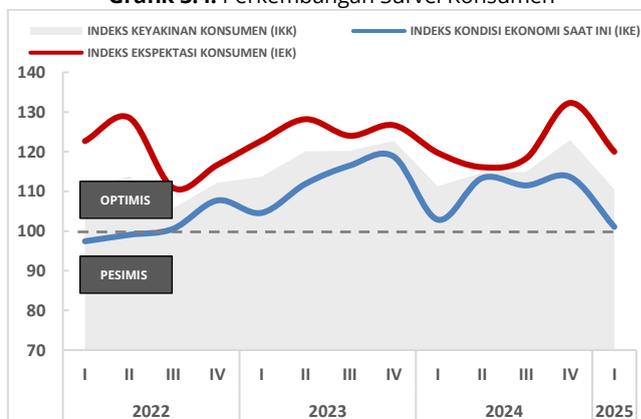


Sumber: Bloomberg, diolah

Laju inflasi triwulan I 2025 yang terkendali ditopang oleh terjaganya keyakinan dan

ekspektasi masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang berada di batas atas level optimis (100). Pada triwulan I 2025, IKK tercatat sebesar 110,52 atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara, IEK tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 120,00. Sedangkan IKE juga lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 101,05 (Grafik 3.4).

Grafik 3.4. Perkembangan Survei Konsumen



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

3.3. Tracking Inflasi Triwulan II 2025

Pada bulan April 2025, tingkat inflasi Provinsi Aceh tetap terjaga sesuai rentang sasaran inflasi nasional di tengah normalisasi kebijakan diskon tarif listrik. Melalui sinergi yang baik dalam TPID, inflasi di Provinsi Aceh tetap terjaga dalam batasan sasaran inflasi nasional. Inflasi Aceh bulan April 2025 mengalami deflasi sebesar 1,61% (mtm) dengan inflasi tahunan terjaga sebesar 3,11% (yoy). Inflasi pada bulan laporan terutama berasal dari normalisasi kebijakan diskon tarif listrik. Selain itu, inflasi juga didorong oleh melonjaknya harga komoditas emas di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global dan peningkatan harga komoditas pangan khususnya ikan tongkol dan cabai merah akibat terbatasnya pasokan.

Tekanan inflasi utamanya terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Tekanan inflasi utamanya berasal dari komoditas *Volatile Food* seperti cabai merah dan ikan tongkol. Komoditas cabai merah mengalami peningkatan harga di tengah menurunnya pasokan pasca panen raya pada bulan Oktober-Desember 2024. Sementara itu, komoditas ikan tongkol masih mengalami peningkatan karena tingginya frekuensi cuaca buruk yang menjadi penghalang nelayan untuk melaut.

Tekanan inflasi masih terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya, bersumber dari terus meningkatnya harga komoditas emas perhiasan. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,56% dengan komoditas emas perhiasan sebagai penyumbang utama. Peningkatan harga komoditas emas perhiasan tercatat masih terus meningkat sejalan dengan kenaikan harga emas global dampak eskalasi konflik geopolitik.

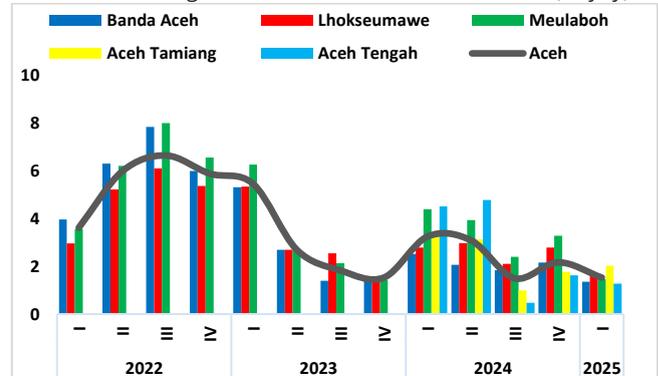
Pada triwulan II 2025, laju inflasi tahunan Provinsi Aceh diperkirakan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini dipicu oleh momen HBKN Idul Adha rendahnya produksi hortikultura pada periode tersebut. Perayaan HBKN Idul Adha berpotensi meningkatkan permintaan akibat peningkatan konsumsi rumah tangga. Lebih lanjut, rendahnya produksi hortikultura dan tren kenaikan harga emas yang terus berlanjut berpotensi meningkatkan resiko inflasi pada periode tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh perlu ditingkatkan guna menjaga capaian inflasi tetap berada pada sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Khususnya melalui program-program pengendalian inflasi *Volatile Food* melalui pemenuhan pasokan guna memenuhi kebutuhan domestik.

3.4. Inflasi Spasial

Tekanan inflasi pada triwulan I 2025 tercatat mengalami penurunan di seluruh Kabupaten/kota pantauan di Provinsi Aceh. Aceh Tamiang mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,02% (yoy), sementara inflasi tahunan terendah terjadi di Aceh Tengah yaitu sebesar 1,28% (yoy).

Sementara secara inflasi bulanan, Aceh Tamiang mengalami laju inflasi paling tinggi dengan inflasi sebesar 1,89% (mtm). Sedangkan Lhokseumawe mengalami inflasi paling rendah sebesar 1,15% (mtm).

Grafik 3.5. Pergerakan Inflasi Kab/Kota IHK di Aceh (% ,yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Komoditas tarif air minum (PAM) tercatat sebagai penyumbang inflasi (yoy) tertinggi sebesar 0,84% di Kota Banda Aceh. Sementara, komoditas tarif listrik menjadi penyumbang deflasi terbesar yang menahan inflasi dengan andil 0,95%.

Tabel 3.13 Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% ,yoy)

Banda Aceh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Tarif Air Minum PAM	0,84	Tarif Listrik	0,95
Emas Perhiasan	0,70	Cabai Merah	0,22
Mobil	0,23	Tomat	0,20
Ikan Dencis	0,20	Baju Anak Stelan	0,08
Kopi Siap Saji	0,19	Telur Ayam Ras	0,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Selanjutnya, komoditas penyumbang inflasi (yoy) terbesar di Kota Lhokseumawe yaitu kontrak rumah dengan andil sebesar 0,44%. Sedangkan, laju inflasi tertahan oleh komoditas tarif listrik yang mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,93%.

Tabel 3.14 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% ,yoy)

Lhokseumawe			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Kontrak Rumah	0,44	Tarif Listrik	0,93
Emas Perhiasan	0,35	Cabai Merah	0,14
Ikan Tuna	0,22	Tomat	0,12
Sigaret Kretek Mesin	0,22	Daging Ayam Ras	0,11
Ikan Tongkol	0,19	Beras	0,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tekanan inflasi di kota Meulaboh tertahan oleh komoditas tarif listrik sebagai komoditas penyumbang deflasi terbesar (1,17%). Sementara, komoditas penyumbang inflasi terbesar tercatat berasal dari komoditas emas perhiasan dengan andil sebesar 1,28%.

Tabel 3.15 Andil Inflasi di Meulaboh (% yoy)

Meulaboh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Emas Perhiasan	1,28	Tarif Listrik	1,17
Sigaret Kretek Mesin	0,30	Cabai Merah	0,37
Minyak Goreng	0,25	Tomat	0,35
Ikan Kembang	0,17	Telur Ayam Ras	0,10
Bakso Siap Santap	0,16	Angkutan Udara	0,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sementara, inflasi (yoy) di Aceh Tamiang didorong oleh komoditas sigaret kretek mesin dengan andil sebesar 0,52%. Kemudian inflasi ditahan oleh komoditas cabai merah yang mengalami deflasi dengan andil terbesar, yaitu 0,76%.

Tabel 3.16 Andil Inflasi di Aceh Tamiang (% yoy)

Aceh Tamiang			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Sigaret Kretek Mesin	0,52	Tarif Listrik	0,76
Ikan Tongkol	0,49	Cabai Merah	0,44
Minyak Goreng	0,41	Telur Ayam Ras	0,23
Daging Ayam Ras	0,30	Tomat	0,23
Ikan Dencis	0,27	Kangkung	0,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Terakhir, laju inflasi (yoy) di Aceh Tengah utamanya tertahan oleh komoditas tarif listrik yang mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,83%. Di sisi lain, komoditas yang memberikan inflasi terbesar adalah komoditas sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil inflasi sebesar 0,55%.

Tabel 3.17 Andil Inflasi di Aceh Tengah (% yoy)

Aceh Tengah			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Sigaret Kretek Mesin	0,55	Tarif Listrik	0,83
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,30	Cabai Merah	0,24
Minyak Goreng	0,28	Tomat	0,12
Ikan Bandeng	0,16	Daging Ayam Ras	0,10
Nasi Dengan Lauk	0,14	Cabai Hijau	0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

3.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Pada triwulan I 2025, inflasi di Provinsi Aceh tetap terjaga meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam menjaga terkendalinya inflasi agar tetap berada pada sasaran $2,5\% \pm 1\%$, TPID Aceh menghadapi berbagai tantangan antara lain bersumber dari HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, gejolak ekonomi dan geopolitik yang semakin memanas.

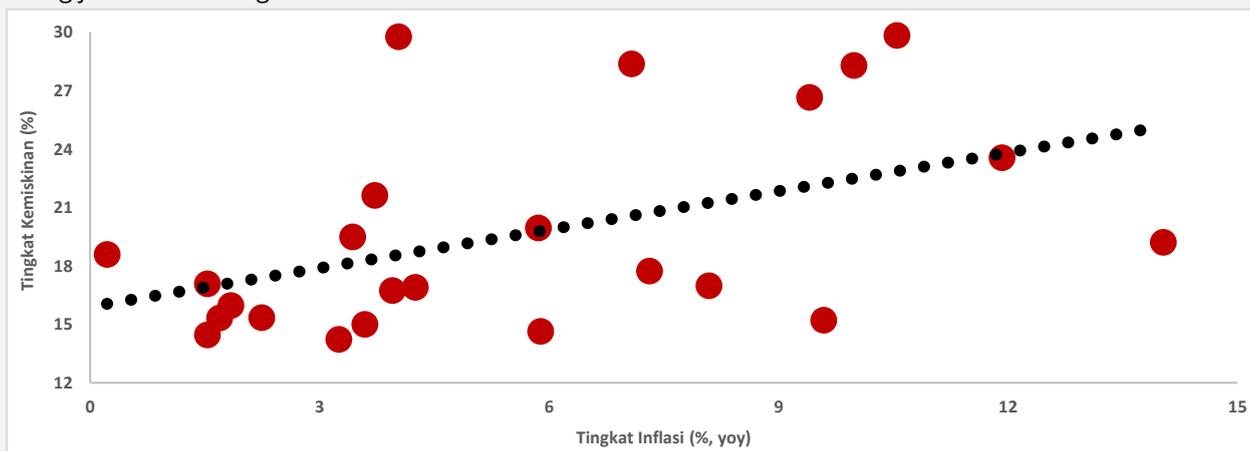
Oleh karena itu, KPw BI Aceh bersama dengan TPID Aceh mengambil langkah strategis untuk pengendalian inflasi yang efektif dan efisien. Dalam rangka menjalankan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Aceh. Pada triwulan I 2025 kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

1. Keterjangkauan Harga
 - a. Pelaksanaan program sinergi operasi pasar murah melalui SPHP dan GPM utamanya di 5 (lima) kab/kota IHK di Provinsi Aceh.
 - b. Melakukan sidak pasar untuk memantau harga dan pasokan di pasar selama HBKN Ramadhan.
 - c. Pemberian diskon pada tarif PAM di Kota Banda Aceh sebesar 30% untuk kelompok Rumah Tangga 1 dan sebesar 10% untuk Rumah Tangga 2.
2. Ketersediaan Pasokan
 - a. Mendorong program peningkatan produksi di daerah sentra a.l. melalui optimalisasi *Good Agriculture Practices*, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan.
 - b. Mendorong *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis.
 - c. Mendorong *contract farming* antara UMKM dan kelompok tani komoditas pangan strategis.
3. Kelancaran Distribusi

- a. Pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan dalam rangka mendukung kelancaran distribusi komoditas pangan strategis dari daerah sentra ke non sentra dengan mempertimbangkan kebutuhan pasokan antar daerah.
 - b. Mengakselerasi program Kerja Sama antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan strategis, utamanya di 5 (lima) kabupaten/kota IHK di Provinsi Aceh dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan.
 - c. Memperkuat KAD daerah sentra dan non sentra serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi fasilitasi distribusi pangan antar daerah.
 - d. Pelaksanaan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk komoditas pangan yang bergejolak (*volatile food*).
4. Komunikasi Efektif
- a. Pelaksanaan *Capacity Building* kepada TPID se-Provinsi Aceh dengan tujuan *refreshment*, peningkatan pemahaman, serta penguatan sinergi antar TPID se-Provinsi Aceh dalam pengendalian inflasi.
 - b. Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID Provinsi Aceh dan TPID Kabupaten/Kota IHK se-Provinsi Aceh dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi serta antisipasi risiko inflasi tahun 2025.
 - c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan yang dihadiri TPID Provinsi Aceh dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
 - d. Pelaksanaan Rapat Evaluasi TPID tahun 2024/25 sebagai bentuk evaluasi kegiatan TPID selama tahun 2024 dan Langkah upaya yang akan dilakukan di tahun 2025.
 - e. Optimalisasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai *early warning system* inflasi.

STABILITAS INFLASI, STRATEGI MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN ACEH

Di Provinsi Aceh, inflasi memiliki dampak langsung terhadap tingkat kemiskinan, menjadikannya salah satu faktor kunci yang perlu dikendalikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Berdasarkan analisis hubungan antara tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi di Aceh selama 24 tahun terakhir, terlihat bahwasanya tingkat inflasi memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan. Hubungan antara inflasi dan kemiskinan bukan hanya korelatif, tetapi juga kausal: ketika harga-harga barang dan jasa pokok meningkat secara terus menerus, daya beli masyarakat melemah, pengeluaran meningkat, dan lebih banyak orang jatuh ke bawah garis kemiskinan.



Grafik Hubungan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Inflasi di Aceh

Sumber : BPS, diolah

Untuk memahami keterkaitan ini, kita perlu mengetahui bagaimana angka kemiskinan ditentukan. Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dihitung berdasarkan kebutuhan konsumsi energi minimum, yakni 2.100 kilokalori per kapita per hari, yang diterjemahkan ke dalam nilai pengeluaran atas sekitar 52 komoditas pangan pokok. Saat ini, GKM di Aceh berada pada kisaran Rp506.089 per kapita per bulan. Di sisi lain, Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) mencakup kebutuhan dasar lainnya seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang nilainya mencapai Rp159.766 per kapita per bulan. Gabungan dari keduanya menghasilkan nilai total garis kemiskinan, dan setiap individu yang memiliki pengeluaran bulanan di bawah nilai ini dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Inflasi berdampak langsung terhadap kenaikan nilai garis kemiskinan ini. Meningkatnya tekanan inflasi, terutama pada komoditas pangan dan kebutuhan dasar, akan berakibat pada kenaikan garis kemiskinan. Hal ini menciptakan kondisi di mana orang-orang yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan—yang dikenal sebagai kelompok rentan miskin—dapat dengan mudah tergelincir ke dalam kemiskinan hanya karena kenaikan harga kebutuhan pokok. Bahkan, bagi mereka yang sudah berada di bawah garis kemiskinan, inflasi semakin memperparah kondisi ekonomi mereka. Maka tidak mengherankan bila data statistik memperlihatkan adanya korelasi positif yang konsisten antara inflasi dan jumlah penduduk miskin: saat inflasi meningkat, angka kemiskinan pun ikut melonjak.

Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika kita menelaah struktur pengeluaran masyarakat miskin di Aceh. Sebagian besar pengeluaran mereka terserap untuk kebutuhan makanan, yang berarti ketergantungan mereka terhadap harga komoditas pangan sangat tinggi. Ketika harga beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya naik, beban pengeluaran mereka meningkat secara signifikan. Tanpa adanya peningkatan pendapatan yang seimbang, mereka terdorong ke dalam kondisi defisit ekonomi rumah tangga. Lebih lanjut, inflasi yang tinggi juga menurunkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, karena porsi pengeluaran untuk non-makanan akan ditekan seminimal mungkin demi mencukupi kebutuhan makan harian. Maka, efek inflasi terhadap kemiskinan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Menyadari pentingnya pengendalian inflasi dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dan terintegrasi. Pertama, stabilisasi harga pangan merupakan prioritas utama. Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pusat dalam menjaga kelancaran distribusi dan pasokan pangan, terutama menjelang momen-momen dengan kecenderungan inflasi musiman seperti Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Kedua, program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi pangan, dan kartu sembako harus terus disempurnakan agar tepat sasaran dan efisien dalam pelaksanaannya. Ketiga, penguatan produksi lokal—terutama di sektor pertanian dan UMKM—perlu digalakkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah yang rawan terganggu oleh logistik dan cuaca. Selain itu, pemantauan inflasi daerah harus dilakukan secara aktif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor yang lebih solid, sehingga bisa dilakukan langkah mitigasi lebih dini terhadap potensi tekanan harga.

Di balik angka-angka statistik dan grafik yang mencerminkan tren inflasi dan kemiskinan, sejatinya terdapat realitas kehidupan masyarakat yang nyata. Ketika inflasi naik dan garis kemiskinan semakin tinggi, itu berarti lebih banyak keluarga yang harus mengurangi jumlah makan, menarik anak dari sekolah, atau menunda berobat karena keterbatasan biaya. Oleh karena itu, pengendalian inflasi bukan hanya tentang menjaga stabilitas ekonomi, melainkan juga tentang menjaga martabat dan hak dasar masyarakat miskin untuk hidup layak. Dalam konteks Aceh, dengan karakteristik sosial-ekonomi dan geografisnya yang khas, upaya pengendalian inflasi menjadi salah satu kunci strategis untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan kolaboratif, inflasi bisa dikendalikan dan masyarakat miskin bisa dilindungi dari gejolak ekonomi yang menghimpit. Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa besar kita mampu mengangkat yang lemah dan menjamin bahwa tidak ada rakyat yang tertinggal.

--000--



BAB IV

PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 tetap terjaga, tercermin dari rendahnya *Non Performing Financing* (NPF) di tengah kinerja pembiayaan yang tercatat tumbuh 12,49% (yoy). Lebih lanjut, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat sebesar 4,67% (yoy). Di sisi lain, rasio pembiayaan untuk UMKM tercatat sebesar 27,94%.

4.1. Kondisi Umum

Kinerja intermediasi perbankan terpantau terjaga, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) diiringi dengan peningkatan kinerja penyaluran pembiayaan. Berdasarkan lokasi bank, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp43,33 triliun atau meningkat sebesar 4,67% (yoy). Sementara itu, penyaluran pembiayaan masih positif tercatat Rp44,50 triliun atau meningkat sebesar 12,49% (yoy). Dengan demikian *Financing Deposit Ratio* (FDR) 102,67% mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 96,32% (Grafik 4.1). Hal ini mencerminkan bahwa secara nominal, peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan lebih rendah dibandingkan peningkatan jumlah DPK yang dihimpun.

Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank)



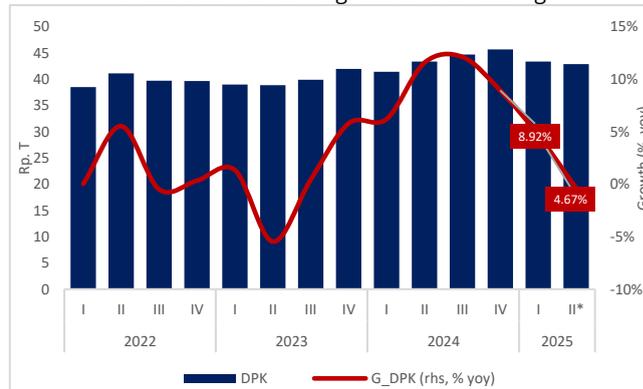
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Stabilitas Sistem Keuangan pada triwulan I 2025 menunjukkan kondisi yang terjaga. Secara agregat, risiko pembiayaan di Provinsi Aceh masih terjaga dalam batas aman yang tercermin dari NPF sebesar 1,95%.

Kinerja penghimpunan DPK terpantau mengalami penurunan. Pada triwulan I 2025, nominal DPK mencapai Rp43,33 triliun, lebih rendah dari triwulan sebelumnya dengan nominal Rp45,67 triliun dengan pertumbuhan DPK sebesar 4,67% (yoy). Penurunan tersebut terjadi karena adanya kontraksi pada DPK pemerintah dan korporasi masing-masing sebesar 2,04% (yoy) dan 10,33% (yoy) lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 3,21% (yoy) dan 19,39%

(yoy). Sementara itu, DPK perseorangan mengalami pertumbuhan sebesar 10,47% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 6,3% (yoy).

Grafik 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan lokasi proyek, penyaluran pembiayaan meningkat. Penyaluran pembiayaan di Aceh berdasarkan lokasi proyek pada triwulan I 2025 sebesar Rp52,64 triliun atau tumbuh sebesar 8,21% (yoy). Mencermati perkembangan tersebut FDR berdasarkan lokasi proyek tercatat relatif tinggi pada periode laporan yakni sebesar 121,47% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 113,1% (Grafik 4.3).

Grafik 4.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, Non Performing Financing (NPF) berdasarkan lokasi bank masih pada rentang aman. NPF pada triwulan I 2025 mencapai 1,95%, sedikit lebih tinggi dibanding triwulan IV 2024 yang sebesar 1,79% (Grafik 4.4.), namun masih berada di bawah *threshold* 5%.

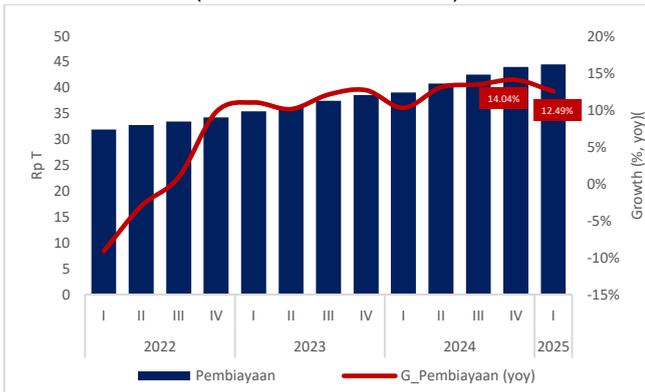
Grafik 4.4 Perkembangan *Non-Performing Financing* (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penyaluran pembiayaan masih tumbuh tinggi namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan berdasarkan lokasi bank menunjukkan nilai 12,49% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,04% (yoy).

Grafik 4.5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank)

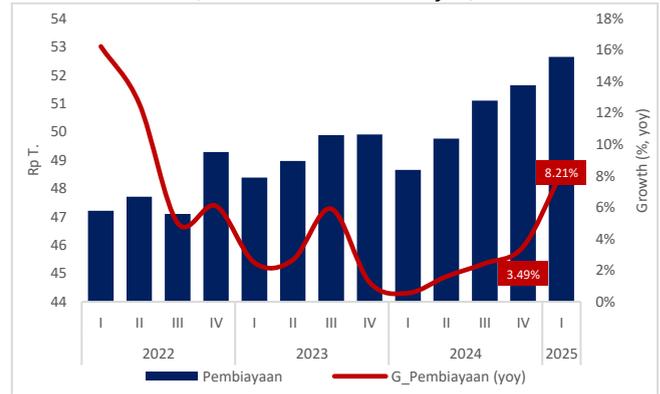


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Di sisi lain, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dari luar Aceh masih menunjukkan peningkatan. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp52,64 triliun, atau tumbuh pada tingkat 8,21% (yoy). Penyaluran pembiayaan tersebut meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp51,64 triliun. Namun demikian, secara nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan berdasarkan lokasi bank. Hal mengindikasikan bahwa pembiayaan di Aceh masih mengandalkan sumber dana dari perbankan di luar Aceh.

Grafik 4.6 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan

(Berdasarkan Lokasi Proyek)



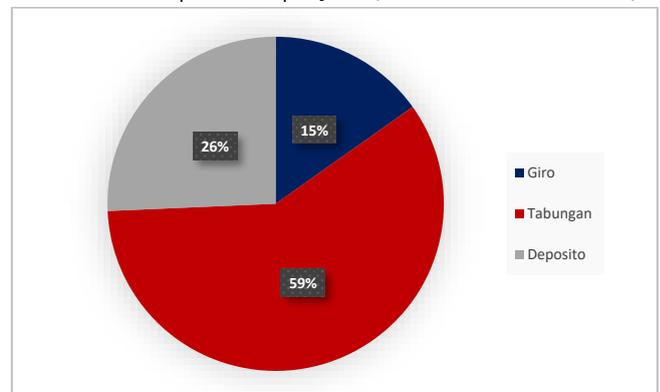
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2. Intermediasi Perbankan

4.2.1. DPK Menurut Jenisnya

Tabungan masih mendominasi komposisi DPK di Aceh. Pada triwulan I 2025, DPK di Aceh didominasi tabungan dengan proporsi sebesar 59 %, diikuti deposito sebesar 26% dan giro sebesar 15%. Secara nominal, total DPK pada triwulan I 2025 adalah sebesar Rp43,33 triliun, yang terdiri dari tabungan Rp25,63 triliun, deposito sebesar Rp11,13 triliun, dan giro Rp6,56 triliun.

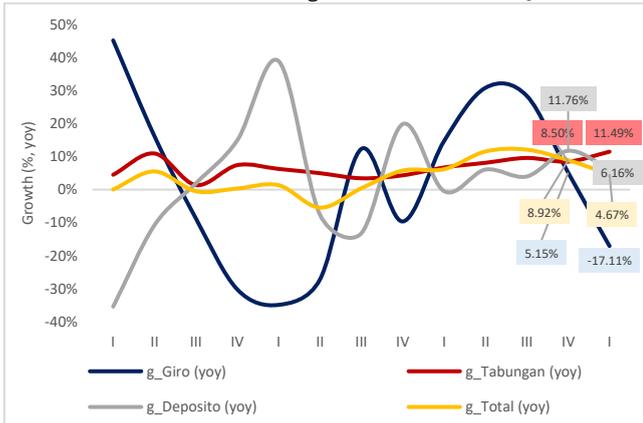
Grafik 4.7 Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, jenis DPK tabungan yang mengalami pertumbuhan yaitu tabungan dan deposito. Pada triwulan I 2024, tabungan dan deposito merupakan jenis DPK yang masih mengalami pertumbuhan positif yaitu masing-masing sebesar 11,49% (yoy) dan 6,16% (yoy). Sementara, giro merupakan komponen DPK yang mengalami penurunan yaitu sebesar 17,11% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 5,15% (yoy).

Grafik 4. 8 Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis

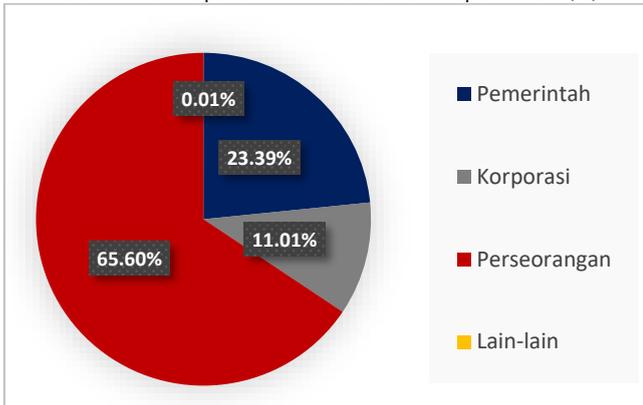


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.2. DPK Menurut Kepemilikan

Berdasarkan kepemilikannya, DPK di Aceh masih didominasi oleh kepemilikan perseorangan. DPK milik perseorangan memiliki porsi terbesar yaitu 65,6%. Sementara, DPK milik pemerintah dan korporasi masing-masing memiliki porsi sebesar 23,39% dan 11,01%.

Grafik 4. 9 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK perseorangan pada triwulan laporan terdiri dari tabungan memiliki porsi sebesar 86,38%, deposito memiliki porsi sebesar 13,31%, dan giro memiliki porsi sebesar 0,30%. Secara pertumbuhan, DPK perseorangan dalam bentuk tabungan dan giro mengalami peningkatan masing-masing sebesar 12,30% (yoy) dan 8,00% (yoy). Sementara itu deposito mengalami kontraksi sebesar 0,03% (yoy).

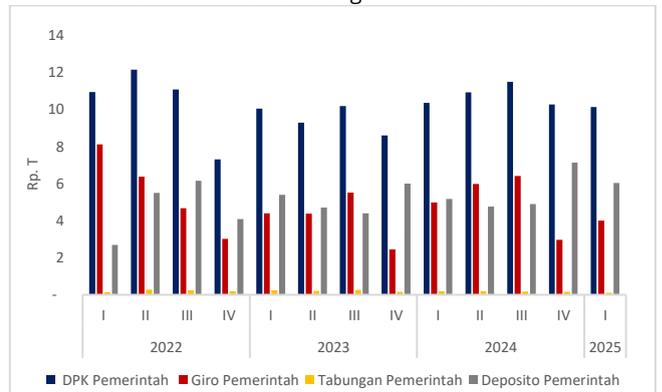
Grafik 4. 10 Perkembangan DPK Perseorangan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, pertumbuhan DPK pemerintah mengalami kontraksi sebesar 2,04% (yoy). Penurunan DPK pemerintah disebabkan oleh pertumbuhan giro pemerintah dan tabungan pemerintah yang mengalami kontraksi masing masing sebesar 19,63% (yoy) dan 47,46% (yoy). Sedangkan deposito pemerintah masih tumbuh sebesar 16,64% (yoy) meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 18,80% (yoy).

Grafik 4. 11 Perkembangan DPK Pemerintah

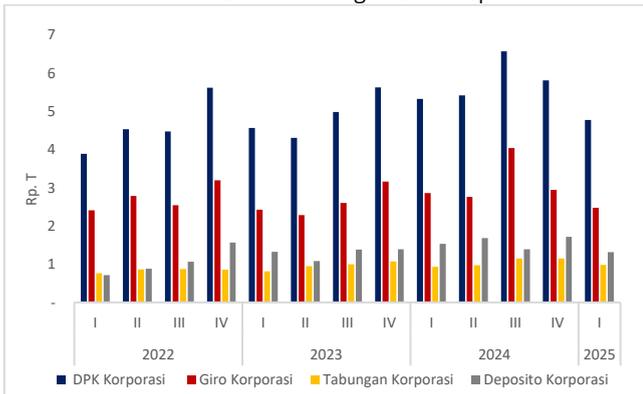


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK korporasi masih didominasi oleh giro. Proporsi DPK korporasi pada triwulan laporan terdiri dari giro sebesar 51,88%, deposito sebesar 27,64%, dan tabungan sebesar 20,49%. Meskipun DPK korporasi jenis giro mendominasi, namun jenis giro mengalami kontraksi sebesar 13,41% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 7,04% (yoy). Begitu juga dengan deposito korporasi yang mengalami kontraksi sebesar 13,88% (yoy). Sedangkan DPK jenis tabungan mengalami peningkatan sebesar 4,93% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya

yang tumbuh sebesar 6,90% (yoy).

Grafik 4. 12 Perkembangan DPK Korporasi

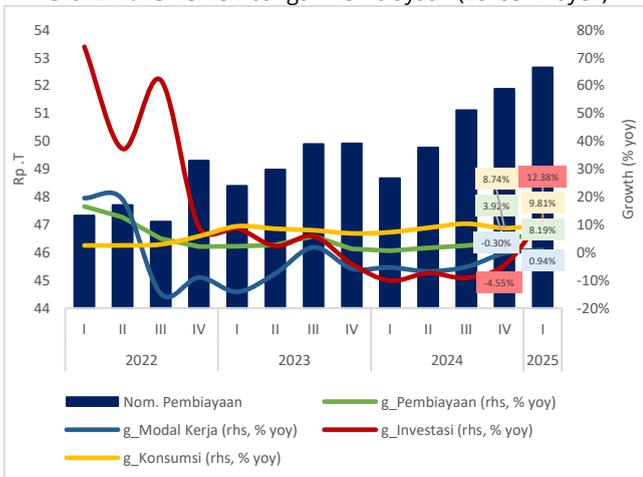


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan I 2025 meningkat sebesar 8,19% (yoy), yang masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan sektor produktif perlu untuk terus didorong, utamanya untuk lapangan usaha atau sektor prioritas agar dapat memberikan efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Pertumbuhan pembiayaan di triwulan laporan didorong oleh jenis pembiayaan konsumsi dan modal kerja yaitu masing-masing sebesar 9,81% (yoy) dan 0,94% (yoy). Pembiayaan investasi yang sempat mengalami kontraksi pada triwulan IV 2024 sebesar 8,53% (yoy) juga sudah mulai menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,38% (yoy).

Grafik 4. 13 Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek)

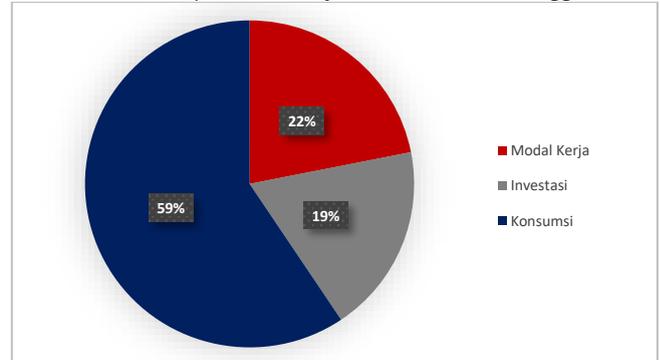


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki

proporsi sebesar 59,00%, sementara penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 41,00%. Adapun pembiayaan dari sektor produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja, masing-masing memiliki porsi sebesar 19,00% dan 22,00% dari total pembiayaan pada triwulan laporan.

Grafik 4. 14 Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

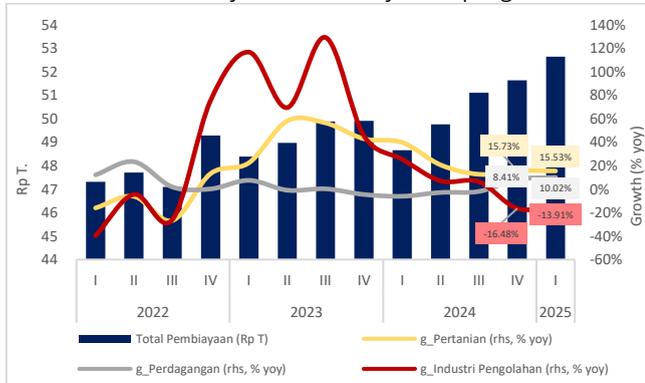
Peningkatan pembiayaan konsumsi sejalan dengan optimisme konsumen yang masih berada pada zona optimis. Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis hingga bulan Maret 2025. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan Maret 2025 tercatat sebesar 110,52 meskipun lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 122,95 namun masih terjaga optimis.

4.2.3. Pembiayaan Menurut Lapangan Usaha (LU)

Pangsa pembiayaan terbesar menurut lapangan usaha didominasi oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran. Pada triwulan I 2025, porsi pembiayaan terhadap LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat 13,35%. Kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU ini mengalami peningkatan sebesar 10,02% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 8,41% (yoy). Sementara itu, LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan memiliki porsi pembiayaan masing-masing sebesar 9,29% dan 7,17%. Pada triwulan I 2025, kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU Pertanian tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 15,53% (yoy) lebih rendah dibandingkan

triwulan sebelumnya yaitu sebesar 15,73%% (yoy). Sedangkan LU Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 13,91% (yoy) namun tidak sedalam pada triwulan sebelumnya yang sebesar 16,48% (yoy).

Grafik 4. 15 Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.4. Pembiayaan UMKM

Kinerja pembiayaan UMKM pada triwulan I 2025 masih tumbuh tinggi. Kinerja pembiayaan yang disalurkan kepada sektor UMKM di Aceh tercatat tumbuh sebesar 13,87% (yoy) relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,02% (yoy). Secara nominal, pembiayaan UMKM pada triwulan I mengalami peningkatan sebesar Rp12,43 triliun, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar Rp12,42 triliun. Adapun rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan UMKM adalah sebesar 4,01%. Sementara itu, rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan di Aceh pada triwulan I 2025 sebesar 27,94%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan inklusi pembiayaan di Aceh.

Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM. Hal ini dilakukan dengan menetapkan target proporsi pembiayaan UMKM perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.24/3/PBI/2022. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan *Loan to Funding Ratio* sebagaimana diatur dalam PBI No. 24/4/PBI/2022. Sementara itu, di tingkat regional Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan di seluruh wilayah

Indonesia juga turut mendorong kinerja UMKM melalui berbagai program pendampingan.

Grafik 4. 16 Perkembangan Pembiayaan UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah.

4.3. Strategi dalam Mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM di Aceh

KPw BI Provinsi Aceh melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. KPw BI Provinsi Aceh secara konsisten terus mendorong peningkatan akses keuangan UMKM untuk mendukung optimalisasi pembiayaan di daerah dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM diantaranya melalui program pengembangan UMKM seperti pendampingan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan melalui optimalisasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID), dan fasilitasi perluasan akses pasar maupun promosi perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Di samping itu, KPw BI Provinsi Aceh menyelenggarakan program pengembangan kapasitas wirausaha melalui Program Pengembangan Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kinerja wirausaha di Provinsi Aceh sehingga dapat naik kelas, terutama bagi wirausaha yang mendukung program pengendalian inflasi Bank Indonesia. Di

samping itu, program WUBI ditujukan untuk mendorong ekspor atau substitusi impor, pariwisata, serta mendukung ekonomi dan keuangan syariah, dan mengembangkan produk dan jasa unggulan daerah. Lebih lanjut, melalui program WUBI dapat menciptakan ekosistem wirausaha di Provinsi Aceh yang mendukung upaya percepatan pengembangan usaha sehingga memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan perekonomian daerah.



BAB V

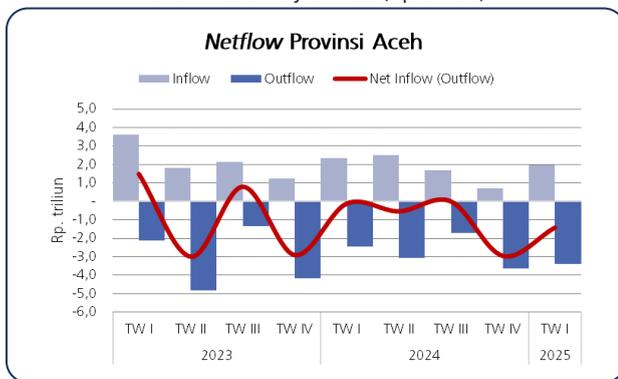
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan I 2025, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi *net outflow* pada triwulan laporan. Sementara, metode pembayaran non tunai seperti, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

5.1. Sistem Pembayaran Tunai

Pengedaran uang kartal mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada triwulan I 2025. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Provinsi Aceh mengalami *net outflow* sebesar Rp1,4 triliun dengan komposisi total uang kartal masuk (*inflow*) sebesar Rp2 triliun dan total uang kartal keluar (*outflow*) sebesar Rp3,4 triliun (Grafik 5.1). *Net outflow* pada triwulan laporan mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh terhadap uang kartal pada triwulan I 2025 cenderung tinggi.

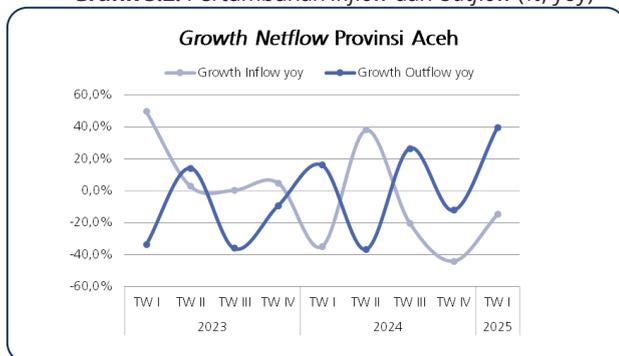
Grafik 5.1. *Netflow* Kas (Rp triliun)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara tahunan, tingkat *outflow* pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 39,3% (yoy) sedangkan *inflow* masih berkontraksi sebesar 14,9% (yoy) (Grafik 5.2). Secara keseluruhan, peredaran uang kartal mengalami kenaikan karena adanya peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga.

Grafik 5.2. Pertumbuhan *Inflow* dan *Outflow* (% yoy)

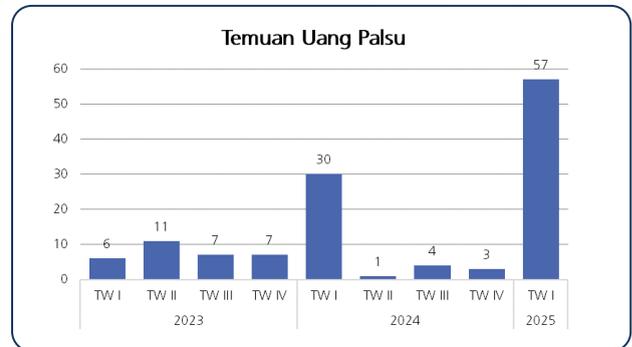


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kualitas peredaran uang kartal tetap terjaga. Temuan uang yang diragukan keasliannya pada triwulan laporan mengalami kenaikan namun masih

dalam batas yang aman. Kenaikan ini seiring meningkatnya peredaran uang pada periode menjelang HBKN Idul Fitri. Temuan tersebut berasal dari kepolisian, penukaran masyarakat, dan penukaran perbankan (Grafik 5.3).

Grafik 5.3. Temuan Uang Palsu (lembar)



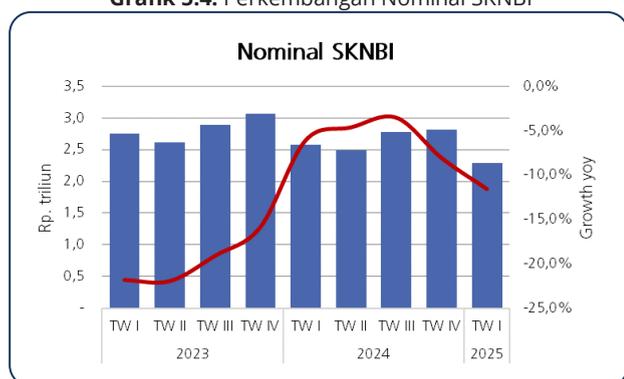
Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Perkembangan pembayaran non tunai baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, terus menunjukkan perbaikan. Sejalan dengan perkembangan digitalisasi di provinsi Aceh, terdapat peningkatan preferensi masyarakat Aceh dalam melakukan transaksi secara non tunai. Hal ini tercermin dari meningkatnya pembayaran menggunakan instrumen APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, instrumen Uang Elektronik (UE) baik *server based* ataupun *chip based* di Provinsi Aceh. Sementara, meningkatnya tren penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) tercermin dari mulai menurunnya pembayaran melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) ritel.

Transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui SKNBI pada triwulan I 2025 berkontraksi 19,1% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan berkontraksi sebesar 11,6% (yoy) atau sebesar Rp2,3 triliun dari Rp2,8 triliun pada triwulan I 2024 (Grafik 5.4).

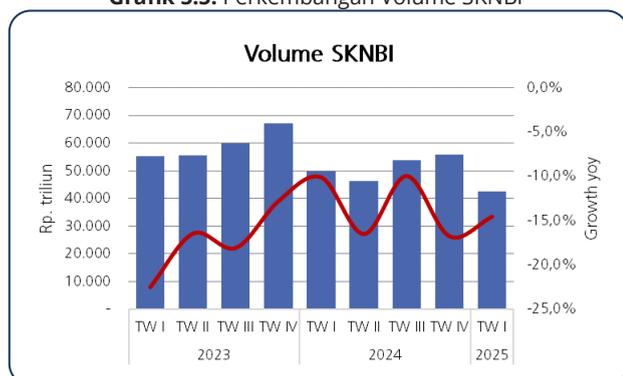
Grafik 5.4. Perkembangan Nominal SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan terkontraksi 24,1% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan tercatat sebanyak 42.465 transaksi atau terkontraksi sebesar 14,6% (yoy) dari 49.723 transaksi pada triwulan I 2024 (Grafik 5.5).

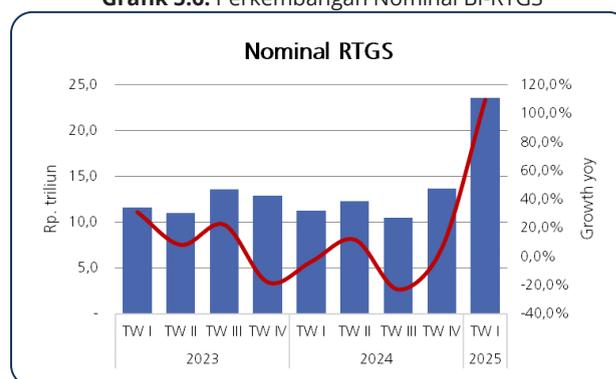
Grafik 5.5. Perkembangan Volume SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan sistem pembayaran nilai besar dalam Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS) secara nominal tercatat meningkat pada triwulan laporan. Transaksi BI-RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp23,6 triliun atau naik sebesar 109,8% (yoy) dari Rp11,2 triliun pada triwulan I 2025. Sejalan dengan kenaikan yoy, nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan naik sebesar 72,3% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 5.6).

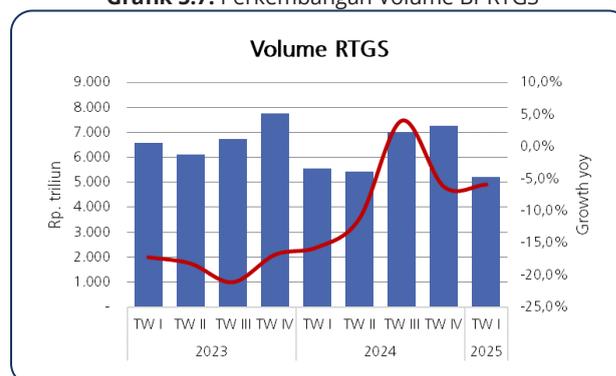
Grafik 5.6. Perkembangan Nominal BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Namun demikian, jika dilihat secara volume, transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan menurun 28,3% dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebanyak 5.214 transaksi atau terkontraksi sebesar 5,9% (yoy) dari 5.538 transaksi pada triwulan I 2024 (Grafik 5.7).

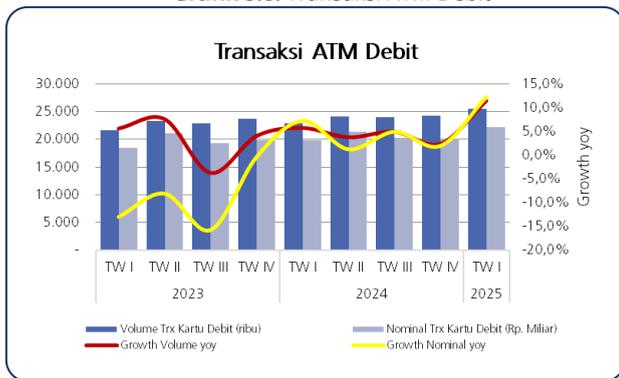
Grafik 5.7. Perkembangan Volume BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya, transaksi menggunakan kartu ATM debit mengalami pertumbuhan pada triwulan laporan. Volume transaksi pada triwulan laporan tercatat meningkat sebesar 11,5% (yoy) menjadi 25 juta transaksi. Sementara nominal transaksi kartu ATM debit tercatat sebesar Rp22,2 Triliun atau tumbuh sebesar 12,2% (yoy) (Grafik 5.8).

Grafik 5.8. Transaksi ATM Debit

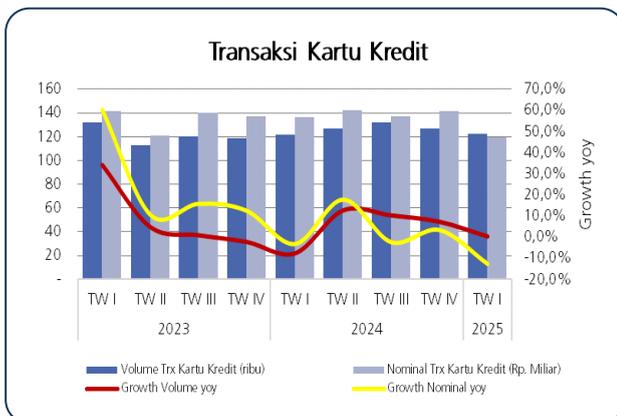


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, dari sisi kartu kredit juga mengalami pertumbuhan pada triwulan laporan.

Volume transaksi naik sebesar 0,3% (yoy) atau menjadi sebesar 122 ribu transaksi (Grafik 5.9). Secara nominal, pada triwulan laporan transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp119 miliar atau terkontraksi sebesar 15,7% (yoy). Selama triwulan I 2025, transaksi kartu kredit mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan nominal mencapai Rp115 miliar atau 96,7% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 118.244 transaksi atau 96,8% dari total volume transaksi.

Grafik 5.9. Transaksi Kartu Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan.

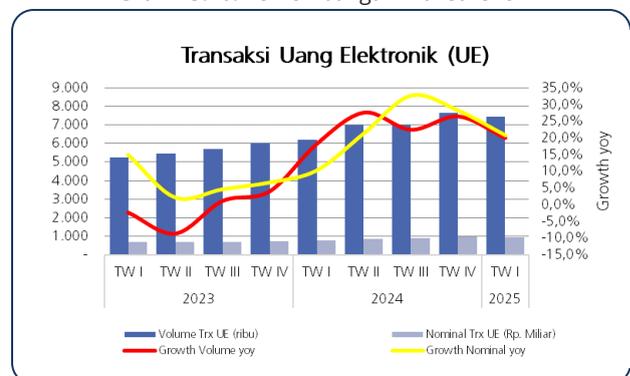
Transaksi UE secara nominal pada triwulan I 2025 mencapai Rp939 miliar atau naik sebesar 20,8% (yoy). Sementara volume transaksi UE naik sebesar 20,1% (yoy) atau sebanyak 7,4 juta transaksi selama

triwulan I 2025 (Grafik 5.10). Tren transaksi UE yang terus meningkat mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun *merchant*.

Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Meningkatnya minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik *chip based* ataupun *server based*. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui *platform e-commerce*. Selama triwulan I 2025, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp641 miliar atau 68,3% dari total nominal transaksi dengan volume sebanyak 6,1 juta transaksi atau 82,3% dari total volume transaksi.

Implementasi QRIS menjadi pendorong meningkatnya transaksi UE berbasis server (*server based*) di Provinsi Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui QRIS mengalami peningkatan yang tercermin dari perkembangan volume dan nominal transaksinya. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless*. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

Grafik 5.10. Perkembangan Transaksi UE

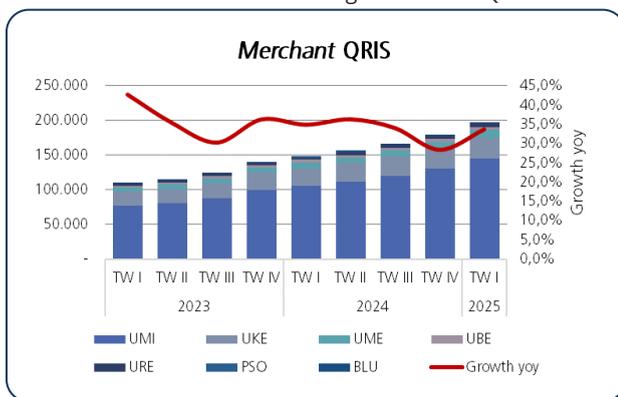


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Peningkatan transaksi QRIS didukung oleh terus meningkatnya jumlah merchant. Hingga triwulan I 2025, terdapat 196.415 *merchant* yang telah

mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non tunai (Grafik 5.11). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 33,7% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 146.931 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 9,8% (qtq) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 178.926 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 145.378 *merchant* (74,0%).

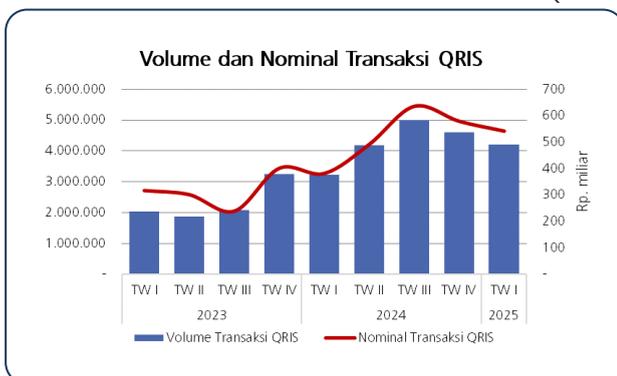
Grafik 5.11. Perkembangan *Merchant* QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara dari sisi jumlah pengguna, hingga triwulan I 2025 telah terdapat 668.579 pengguna atau bertambah sebanyak 9.858 selama triwulan laporan. Dari sisi volume transaksi, pada triwulan I 2025 terdapat 4,2 juta transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp542,8 miliar (Grafik 5.12).

Grafik 5.12. Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

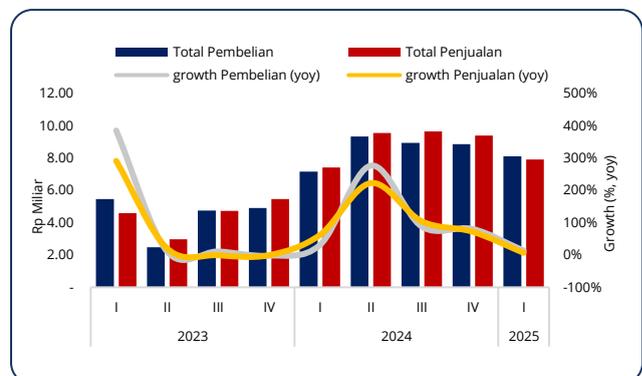
Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang stabil, Bank Indonesia juga berperan sebagai regulator Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di daerah.

Hingga triwulan I 2025, terdapat 14 (empat belas) KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh yang melayani pembelian maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 6 (enam) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sementara 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan I 2025, transaksi KUPVA BB berizin di Provinsi Aceh meningkat jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan meningkat sebesar 9,95% (yoy) menjadi Rp16,00 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp14,55 miliar.

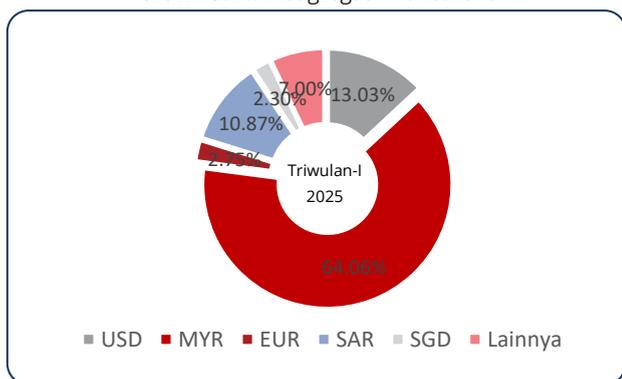
Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA pada triwulan laporan menunjukkan adanya peningkatan. Pembelian UKA di Aceh pada triwulan I 2025 masih tumbuh sebesar 13,32% (yoy) yaitu dari Rp7,15 miliar pada triwulan I 2024 menjadi Rp8,10 miliar. Sejalan dengan hal tersebut penjualan UKA pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan sebesar 6,69% (yoy) dari Rp7,40miliar pada triwulan I 2024 menjadi Rp7,90 miliar (Grafik 5.13).

Grafik 5.13. Transaksi KUPVA BB



Sumber: LKPBU, diolah

Grafik 5.14. Disagregasi Transaksi UKA



Sumber: LKPBU, diolah

Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 64,06% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 13,03% (Grafik 5.14). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor ekspor impor, pariwisata, pendidikan, dan remitansi TKA yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Provinsi Aceh.

5.4. Penyaluran Program Sembako dan PKH

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Sesuai instruksi Kementerian Sosial Republik Indonesia, penyaluran secara tunai dilakukan oleh PT Pos Indonesia, sedangkan penyaluran secara non tunai dilakukan oleh Himbara - BSI. Jenis bantuan sosial yang disalurkan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan

implementasi penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), Bank Indonesia juga senantiasa melakukan sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, bantuan PKH Tahap I tahun 2025 di Provinsi Aceh telah disalurkan sebesar 100% kepada KPM (Grafik 5.15). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap I tercatat sebanyak 310.920 atau telah mencapai 99,37% dari target jumlah penerima sebanyak 312.884 KPM. Berbeda dengan penyaluran Tahun IV tahun 2024 dimana masih terdapat Kota/Kab yang penyalurannya dilakukan hanya secara tunai. Oleh karena itu, kenaikan penyaluran pada triwulan laporan didukung oleh peningkatan efektivitas proses penyaluran oleh BSI dan kesiapan infrastruktur sistem pembayaran.

Grafik 5.15. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)

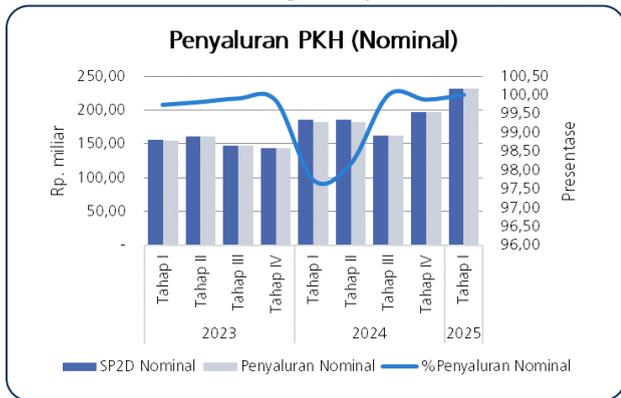


Sumber: Himbara, diolah

Dari aspek nominal, besaran bantuan yang disalurkan pada setiap tahap mengalami fluktuasi seiring dengan penyesuaian terhadap data KPM yang diperbarui secara berkala oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pada Tahap I tahun 2025, nominal bantuan yang disalurkan mencapai sebesar Rp231,90 miliar dengan tingkat penyaluran PKH yang telah mencapai 100% (Grafik 5.16). Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan apabila

dibandingkan dengan Tahap IV tahun 2024, yaitu sebesar Rp196,93 miliar.

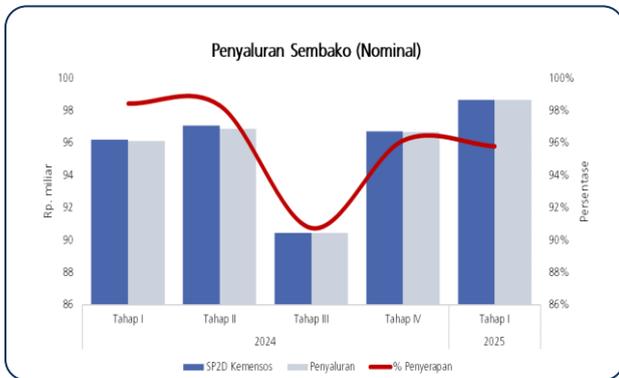
Grafik 5.16. Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Pada Tahap I 2025, nominal bantuan yang disalurkan Program Sembako sebesar Rp99 miliar dengan persentase nominal penyaluran Program Sembako telah mencapai 95,8% (Grafik 5.17). Jumlah tersebut naik dibandingkan Tahap IV 2024 sebesar Rp97 miliar. Kenaikan penyaluran sejalan dengan peningkatan Kota/Kab penerima bansos secara non tunai, dari semula hanya 492 Kab/Kota menjadi 541 Kab/Kota pada 2025.

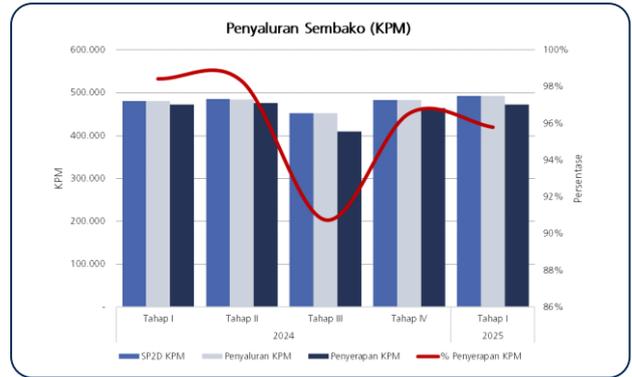
Grafik 5.17. Perkembangan Program Sembako (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Sementara itu, jumlah KPM program sembako pada triwulan laporan naik menjadi 493 ribu KPM dari jumlah KPM Tahap IV 2024 sebanyak 483 ribu KPM (Grafik 5.18). Kenaikan penyaluran didukung oleh peningkatan efektivitas proses penyaluran oleh BSI.

Grafik 5.18. Perkembangan Program Sembako (KPM)



Sumber: Himbara, diolah



BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Indikator kesejahteraan Aceh mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan I 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan pada Februari 2025. Namun demikian, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, kemiskinan di Aceh masih tertinggi, sementara TPT berada pada peringkat ketiga tertinggi.

6.1. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh mengalami perbaikan. Pada Februari 2025, tingkat TPT di Provinsi Aceh tercatat sebesar 5,50%, mengalami penurunan sebesar 0,06% poin dibandingkan Februari 2024 sebesar 5,56%. Sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2025, terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 100 ribu orang. Penurunan TPT juga didorong oleh membaiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2025 yang tercatat sebesar 65,63%, meningkat dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 64,15%.

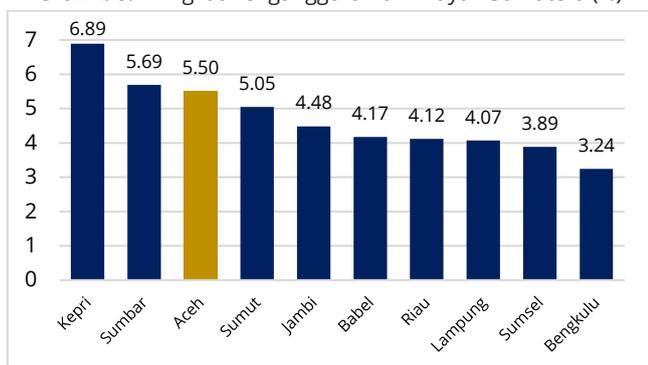
Tabel 6. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

	TINGKAT PENGANGGURAN %	
	Februari 2024	5,56%
Februari 2025	5,50% ▼	

Sumber: BPS, diolah

Meningkatnya TPAK menunjukkan semakin meningkatnya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di Provinsi Aceh. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah Lapangan usaha (LU) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,95% poin) dan sektor Pengangkutan dan Pergudangan (0,79% poin).

Grafik. 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Penurunan TPT di Aceh masih lebih lambat jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. TPT di Provinsi Aceh menduduki

peringkat ketiga tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Aceh didukung oleh berbagai faktor. Pada Triwulan I merupakan musim panen padi sehingga terdapat penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian. Disamping itu, meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa menjelang bulan Ramadhan berkontribusi pada terciptanya lapangan pekerjaan musiman. Selain itu, perbaikan kondisi ketenagakerjaan ini juga merupakan hasil dari berbagai upaya yang terintegrasi, seperti program pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Tabel 6. 2. Perkembangan TPT

PENGANGGURAN	2024	2025
	Februari	Februari
Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)		
Bekerja	2.455	2.556
Pengangguran	145	149
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Persentase TPAK (%)	64,15	65,63
Tingkat Pengangguran Terbuka		
TPT (%)	5,56	5,50

Sumber: BPS, diolah

Tabel 6.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Februari 2025 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	40,02
Perdagangan Besar & Eceran	14,23
Pendidikan	7,55
Industri Pengolahan	7,40
Konstruksi	6,05
Akomodasi dan Makan Minum	6,05
Administrasi Pemerintahan	5,92
Jasa Lainnya	3,27

Sumber: BPS, diolah

LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar. Pangsa penyerapan tenaga kerja pada LU ini mencapai 40,02%. Selanjutnya diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran (14,23%), Pendidikan (7,55%), Industri Pengolahan

(7,40%), Konstruksi (6,05%), Akomodasi dan Makan Minum (6,05%), Administrasi Pemerintahan (5,92%), dan Jasa Lainnya (3,27%).

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2025, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 32,81%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan SD ke Bawah sebesar 25,37%, SMP sebesar 18,74%, perguruan tinggi sebesar 14,98%, SMK sebesar 4,73%, dan diploma sebesar 3,37%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2024.

Tabel 6.4. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

Pendidikan Tertinggi	Februari	Februari
	2024	2025
Sekolah Menengah Atas	34,40%	32,81%
Sekolah Dasar ke Bawah	26,10%	25,37%
Sekolah Menengah Pertama	19,09%	18,74%
Diploma IV, S1, S2, S3	13,49%	14,98%
Sekolah Menengah Kejuruan	3,55%	4,73%
Diploma I/II/III	3,37%	3,37%

Sumber: BPS, diolah

Data Februari 2025 menunjukkan bahwa status pekerjaan penduduk Provinsi Aceh didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai yaitu sebesar 30,73%. Sementara itu, porsi terkecil adalah pekerja berstatus Bebas Non Pertanian sebanyak 4,38%.

Sementara jika dilihat berdasarkan status pekerjaan utama, tenaga kerja informal mengalami peningkatan. Pada Februari 2025, penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 35,69%, sedangkan kegiatan informal sebanyak 64,31%. Dibandingkan Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan 1,12% poin. Di sisi lain, penduduk dengan pekerjaan informal mengalami peningkatan sebesar 1,12%. Hal ini patut menjadi perhatian

karena pekerja informal cenderung berpendapatan tidak tetap sehingga memiliki kerentanan lebih tinggi.

Tabel 6.5. Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan

Status Pekerjaan	Februari	Februari
	2024	2025
	Porsi (%)	Porsi (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	31,80%	30,73%
Berusaha Sendiri	23,86%	21,57%
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	15,65%	16,08%
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	15,07%	14,22%
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar	5,01%	8,06%
Pekerja Bebas di Pertanian	4,60%	4,96%
Pekerja Bebas di Non Pertanian	4,00%	4,38%

Sumber: BPS, diolah

Nilai Tukar Petani⁴ (NTP) Provinsi Aceh pada triwulan I 2025 relatif stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2025, NTP tercatat sebesar 121,54 stabil jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 122,24. NTP yang di atas 100 menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Pada bulan April 2025, peningkatan NTP terjadi di subsektor Hortikultura (NTPH) sebesar 4,04% dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 1,05%.

Tabel 6.6. Nilai Tukar Petani



NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Triwulan IV 2024 122,24

Triwulan I 2025 121,54 ▼

Sumber: BPS, diolah

6.2. Kemiskinan

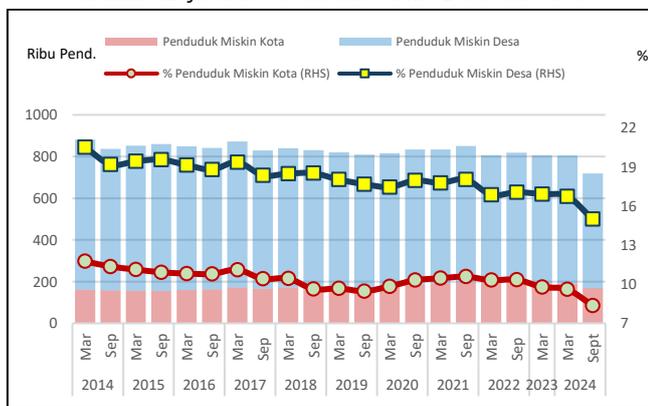
Sejalan dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, angka kemiskinan mengalami

⁴ Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

penurunan. Berdasarkan data terakhir, persentase kemiskinan di Provinsi Aceh pada September 2024 tercatat sebesar 12,64%, menurun 1,59% dibandingkan Maret 2024 sebesar 14,23%. Penurunan tersebut menjadi pencapaian tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir.

Penurunan persentase penduduk miskin didorong oleh penurunan kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan menurun masing-masing dari 16,75% dan 9,60% pada Maret 2024, menjadi 14,99% dan 8,37% pada September 2024. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada posisi September 2024 sebanyak 718,96 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan posisi Maret 2024 yang sebanyak 804,53 ribu jiwa. Jika dilihat lebih rinci, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 10,38% dari sebelumnya 613,98 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 550,25 ribu jiwa pada September 2024. Penurunan penduduk miskin turut dialami wilayah perkotaan dengan penurunan sebesar 11,46% dari sebelumnya 190,55 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 168,71 ribu jiwa pada September 2024.

Grafik 6.2. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota

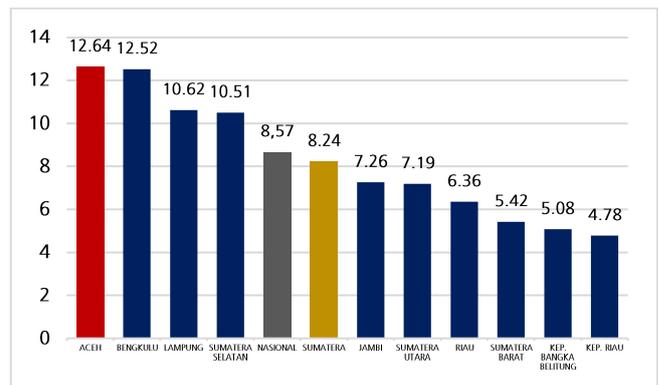


Sumber: BPS, diolah

*September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan

Data tingkat kemiskinan pada September 2024 menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Angka kemiskinan Aceh yang dengan sebesar 12,64%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera yang sebesar 8,24% dan juga Nasional (8,57%).

Grafik 6.3. Penduduk Miskin di Wilayah Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Penurunan persentase kemiskinan juga turut memengaruhi sebaran garis kemiskinan di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil survei di Provinsi Aceh, garis kemiskinan pada September 2024 dibandingkan dengan Maret 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,7%, sehingga pendapatan per kapita perbulan yang semula Rp661.227,- menjadi Rp665.855,- per kapita per bulan. Kontribusi komponen makanan masih memberikan andil terbesar terhadap nilai garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan di September 2024 yakni sebesar Rp506.089,- per kapita per bulan sementara komponen bukan makanan sebesar Rp159.766,- per kapita per bulan.

Komoditas makanan masih menjadi komponen terbesar pembentuk garis kemiskinan. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa komponen terbesar pembentuk Garis Kemiskinan adalah komoditas makanan dengan sumbangan sebesar 75,02% di perkotaan dan 76,63% di perdesaan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/ cakalang, dan telur ayam. Sementara peranan komoditas bukan makanan berkontribusi sebesar 24,98% di perkotaan dan 23,37% di perdesaan dengan komoditas yang menyumbang besar terhadap garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Tabel 6.7. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2)

Kemiskinan

KEMISKINAN (%)		
MARET 2024	14,23	▼
SEPTEMBER 2024	12,64	
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)		
MARET 2024	2,620	▼
SEPTEMBER 2024	1,951	
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)		
MARET 2024	0,712	▼
SEPTEMBER 2024	0,470	

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode September 2024 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. P1 mengalami penurunan dari 2,620 pada Maret 2024 menjadi 1,951 pada September 2024. Begitu pula dengan P2 yang mengalami penurunan setelah sebelumnya 0,712 pada Maret 2024 menjadi 0,470 pada September 2024. Turunnya nilai Indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Begitu juga dengan kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin menyempit.

Tabel 6.8. Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

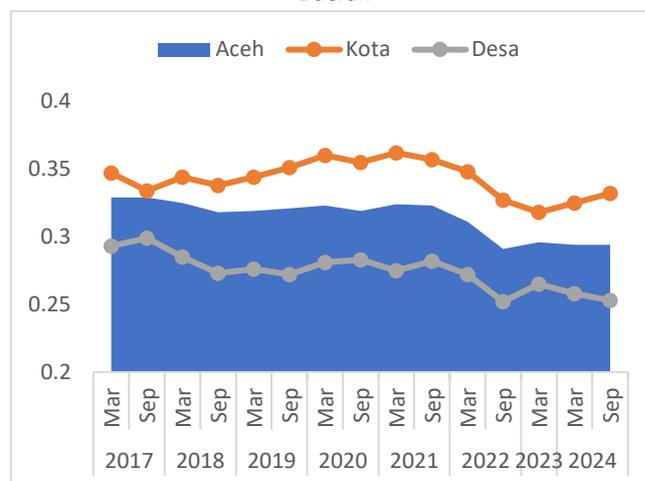
Daerah	2024		2024	
	MARET		SEPTEMBER	
	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,581	0,401	0,945	0,275
Perdesaan	3,182	0,881	2,503	0,633
Gabungan	2,620	0,712	1,951	0,470

Sumber: Data BPS, diolah

Ketimpangan di perkotaan mengalami peningkatan, sementara ketimpangan di perdesaan mengalami perbaikan. Dalam pengukuran ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, digunakan indikator Rasio Gini⁵. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada

perkotaan pada September 2024 sebesar 0,332, sedangkan pada perdesaan sebesar 0,253. Terjadi peningkatan rasio di perkotaan dan penurunan rasio di perdesaan pada periode September 2024 dibandingkan Maret 2024. Rasio Gini di Provinsi Aceh secara keseluruhan menunjukkan angka yang stabil di 0,294 pada September 2024 maupun di semester sebelumnya, yakni Maret 2024. Sedangkan, jika dibandingkan dengan rasio gini Provinsi Aceh September 2022, terjadi peningkatan dari 0,291 menjadi 0,294 di September 2024.

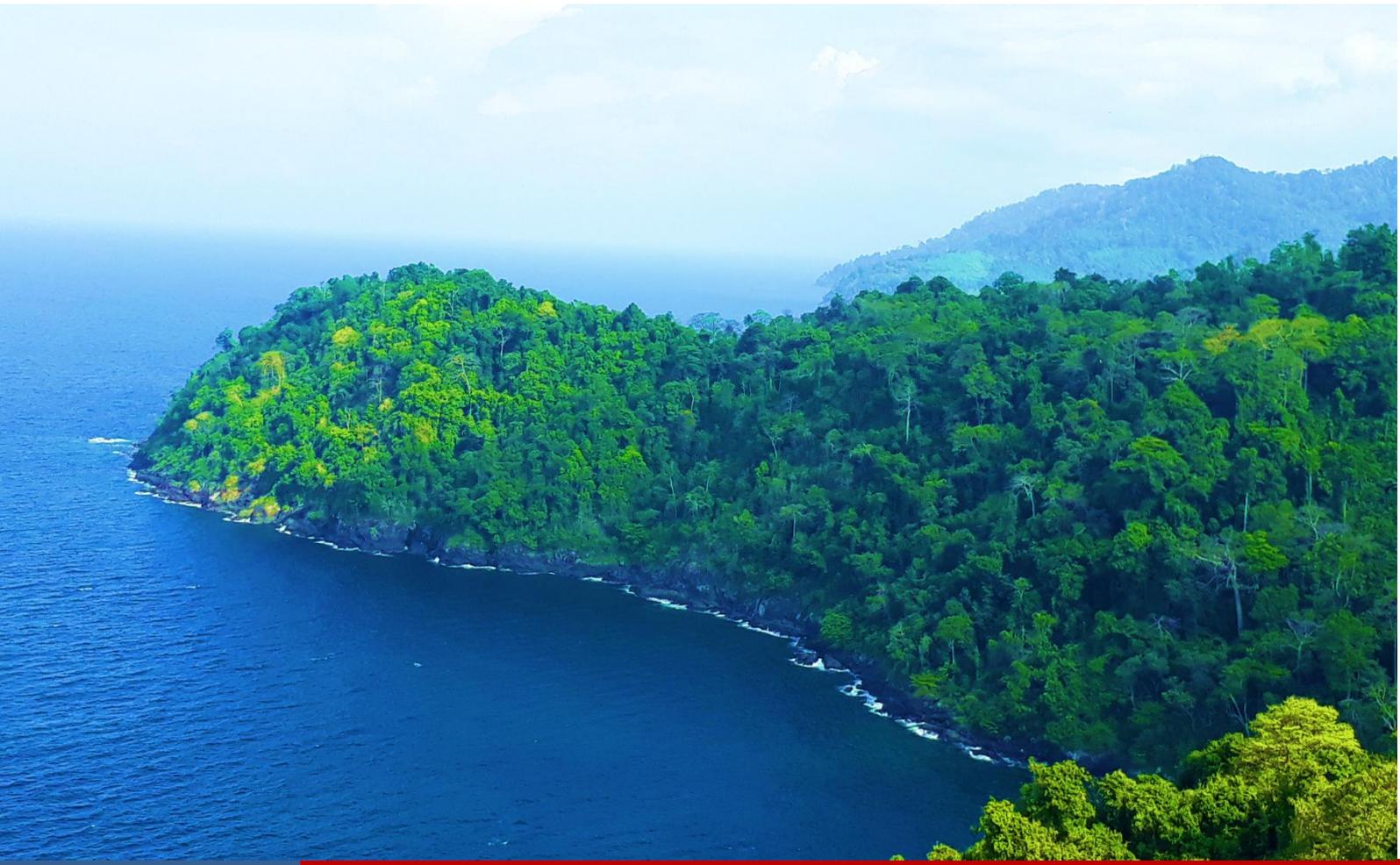
Grafik 6.4. Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah



Sumber: BPS, diolah

*September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan

⁵Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi



BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2025 diperkirakan tetap kuat berada di kisaran 4,11%-4,51% (yoy) atau melambat dibandingkan angka pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,66% (yoy). Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh ditopang oleh masih positifnya pertumbuhan investasi dan ekspor luar negeri, dan terjaganya konsumsi rumah tangga.

7.1. Prospek Makroekonomi

Di sisi global, kinerja pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024.

Berdasarkan *"World Economic Outlook: A Critical Juncture amid Policy Shifts"* oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan April 2025, perekonomian global tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,8% (yoy) atau turun sebesar -0,5% (yoy) dari angka proyeksi awal pada Januari 2025 sebesar 3,3% (yoy) pada *"World Economic Outlook: Divergent and Uncertain"* Edisi Januari 2025. (Tabel 7.1). Secara umum, revisi bawah terjadi pada proyeksi pertumbuhan ekonomi awal tahun IMF untuk hampir semua negara di dunia. Revisi bawah ini terjadi mempertimbangkan kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat yang disahkan pada tanggal 2 April 2025.

Tabel 7.1 Angka Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia di Tahun 2025 (%yoy)

Wilayah	Oct '24	Jan '25	Apr'25
World Output	3,2	3,3	2,8
Advance Economies	1,8	1,9	1,4
United States	2,2	2,7	1,8
Euro Area	1,2	1,0	0,8
Japan	1,1	1,1	0,6
United Kingdom	1,5	1,6	1,1
Emerging Market	4,2	4,2	3,7
China	4,5	4,6	4,0
India	6,5	6,5	6,2

Sumber: *International Monetary Fund (IMF)*

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Amerika Serikat di tahun 2025 menurun dari proyeksi sebelumnya pada bulan Januari 2025 sebesar 2,7% (yoy) menjadi 1,8% (yoy) pada April 2025. Penurunan angka proyeksi yang signifikan ini turut dipengaruhi oleh dampak tarif resiprokal yang berpotensi meningkatkan inflasi impor (*import inflation*) dan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat AS yang berkontribusi sebesar 68,8% dari total PDB AS.

Penurunan angka proyeksi juga terjadi pada negara-

negara maju lainnya seperti negara anggota Uni Eropa, Inggris, dan Jepang. Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi negara anggota Uni Eropa, terdapat revisi bawah terbatas dari 1,0% (yoy) pada proyeksi Januari 2025 menjadi 0,8% (yoy) pada April 2025, atau turun sebesar -0,2% (yoy). Perlambatan yang lebih dalam dapat dihindari oleh Uni Eropa di antara lain karena turut meningkatnya upah riil dan produktivitas masyarakat, serta pelanggaran APBN Jerman seiring dengan dinaikkannya batas hutang (*debt brake*). Sementara itu, tarif resiprokal diperkirakan berdampak lebih dalam pada Jepang dan Inggris yang masing-masing direvisi bawah sebesar -0,5% (yoy). Revisi bawah yang lebih dalam ini turut dipengaruhi oleh potensi inflasi yang dapat menghambat peningkatan kinerja konsumsi masyarakat.

Laju pertumbuhan negara berkembang seperti Cina dan India juga mengalami revisi bawah dari proyeksi sebelumnya oleh IMF. Laju pertumbuhan ekonomi Cina pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 4,0% (yoy) mengalami revisi bawah yang cukup dalam sebesar -0,6% (yoy), dari 4,6% (yoy) pada proyeksi Januari 2025. Lebih dalamnya perlambatan ini dikarenakan besarnya pasar AS terhadap pangsa ekspor Cina yaitu sebesar 14,7%. Kendati demikian, perlambatan yang lebih dalam dapat tertahan akibat kebijakan pelanggaran fiskal oleh pemerintah RRC pada bulan November 2024. Di sisi lain, laju pertumbuhan India pada tahun 2025 diperkirakan berada pada angka 6,2% (yoy) atau hanya mengalami revisi bawah sebesar -0,3% (yoy) dari proyeksi Januari 2025 sebesar 6,5% (yoy), lebih baik dibandingkan revisi proyeksi Cina dan negara-negara maju. Tetap tingginya proyeksi pertumbuhan India, turut didukung oleh prospek menguatnya konsumsi rumah tangga, dan meningkatnya upah riil di atas angka inflasi.

Pada proyeksi inflasi dunia 2025, terdapat penyesuaian terbatas dan angka Inflasi diperkirakan akan menurun hingga 2026. Rata-rata inflasi tahunan global pada tahun 2025 diperkirakan berada pada angka 4,3% (yoy) atau lebih tinggi sebesar 0,1% (yoy) dari angka proyeksi Januari 2025. Angka inflasi tersebut akan berlanjut turun ke angka

3,6% (yoy) di tahun 2026, atau lebih tinggi sebesar 0,1% dari proyeksi Januari 2025. Kendati demikian, terdapat banyak potensi peningkatan risiko inflasi yang disebabkan oleh perang dagang dan perkembangan geopolitik global. Sebagai contoh, potensi keberlanjutan dan peningkatan tarif resiprokal oleh AS, penguatan Dollar AS, potensi penurunan suku bunga yang lebih rendah oleh *The Fed* dan Bank Sentral lainnya untuk mengantisipasi peningkatan inflasi, serta konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan Ukraina.

Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap tumbuh kuat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang baik. Inflasi nasional pada tahun 2025 juga diproyeksikan akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy). Angka tersebut dapat dicapai dengan dukungan konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Walaupun demikian, secara umum terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia di tahun 2025, baik dari sisi global maupun sisi domestik.

Dari sisi tantangan global, perekonomian Indonesia diperkirakan akan menghadapi dampak dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Kendati Presiden AS telah mengumumkan akan menunda kebijakan tersebut hingga bulan Juli 2025, tarif resiprokal ini saat dijalankan akan berdampak pada turunnya volume dan nilai ekspor Indonesia melalui *second round effect*, yaitu menurunnya jumlah ekspor negara produsen barang industri seperti Cina dan Jepang ke AS yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya ekspor bahan baku dan komoditas Indonesia ke negara tersebut.

Dari sisi tantangan domestik, perekonomian Indonesia diperkirakan akan dihadapi tantangan seperti tren pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke informal. Selain dari itu dampak berkelanjutan dari kebijakan efisiensi anggaran juga diperkirakan berdampak pada sektor penyedia jasa akomodasi, makanan dan minuman.

Perekonomian Aceh pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 4,11% - 4,51% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 4,66% (yoy). Dari sisi permintaan, tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi Aceh ditopang oleh masih positifnya pertumbuhan investasi dan ekspor luar negeri, dan terjaganya konsumsi rumah tangga. Komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap tumbuh kuat. Hal ini turut didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi sesuai pada target nasional sebesar 2,5±1% (yoy).

Sementara itu, dari sisi penawaran pertumbuhan ekonomi akan turut didorong oleh peningkatan kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU) strategis seperti LU Pertambangan, LU Perdagangan, dan LU Transportasi dan Pergudangan.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada 2025 diperkirakan akan tetap kuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini seiring dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi Asta Cita. Kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan turut mendorong angka pertumbuhan khususnya pada LU Pertanian. Kendati demikian, konsumsi pemerintah diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan besar seperti Pemilu, PON, dan Pilkada yang turut mendorong angka realisasi belanja pemerintah. Selain dari itu, kebijakan efisiensi anggaran juga turut mempengaruhi tingkat konsumsi pemerintah.

Pertumbuhan PMTB/investasi pada tahun 2025 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Hal ini dikarenakan oleh selesainya seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Aceh pada akhir tahun 2024, dan belum adanya pembangunan PSN baru di tahun 2025. Kendati demikian, normalisasi angka pertumbuhan PMTB pasca selesainya PSN diperkirakan akan terjadi di tahun 2025. Kendati demikian terdapat beberapa potensi proyek yang akan dimulai pada tahun 2025 berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 perihal

Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2025-2029. Selain dari itu, normalisasi angka pertumbuhan ini juga turut didorong oleh aktivitas konstruksi di Provinsi Aceh seperti pada sektor perumahan, konstruksi jalan, dan infrastruktur penunjang.

Kinerja ekspor luar negeri secara keseluruhan tahun 2025 diperkirakan akan tetap tinggi. Kinerja ekspor luar negeri diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kinerja tahun 2024. Peningkatan kinerja ekspor diperkirakan seiring dengan tingginya ekspor batubara yang didorong oleh permintaan dari India. Pertumbuhan angka ekspor diperkirakan masih tetap didorong dan didominasi oleh komoditas batubara dan kopi. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh IMF pada bulan April 2025, harga batubara diperkirakan mengalami penurunan sebesar 15,8% (yoy) pada tahun 2025. Harga kopi arabika setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2024, diperkirakan akan termoderasi di tahun 2025 dan 2026 dengan penurunan harga sebesar -8,3% (yoy) dan -4,0% (yoy). Moderasi harga juga diperkirakan akan terjadi pada komoditas minyak sawit (CPO), yang diproyeksikan turun pada tahun 2025 dan 2026 sebesar -7,0% (yoy).

Dari sisi LU, angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 utamanya didorong oleh kuatnya kinerja LU strategis seperti LU Pertambangan, LU Perdagangan, serta LU Transportasi dan Pergudangan. Secara umum, kinerja LU Pertambangan diperkirakan tetap tumbuh tinggi, kendati tidak setinggi angka pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan pada LU Pertambangan turut didorong oleh tetap tingginya permintaan akan komoditas batubara, ditengah moderasi harga batubara dunia.

Sementara itu, kinerja LU Perdagangan, dan LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan akan membaik, seiring dengan peningkatan permintaan akan barang konsumsi dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Hal ini turut didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi.

7.2. Prospek Inflasi

Berdasarkan prakiraan dari *The International Monetary Fund* (IMF), rata-rata angka inflasi global diperkirakan berada pada angka 4,3% (yoy) pada tahun 2025 dan berlanjut ke angka 3,6% (yoy) di tahun 2026. Angka tersebut masih berada di atas level pra-pandemi dengan kisaran 3,5% (yoy) pada tahun 2017-2019. Kendati demikian, masih terdapat risiko tekanan inflasi yang diakibatkan oleh perkembangan geopolitik global, seperti perang dagang akibat dari kebijakan tarif resiprokal AS dan menguatnya Dollar AS. Sementara itu, inflasi nasional diperkirakan akan kembali ke dalam rentang target inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2025, laju inflasi Provinsi Aceh diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam range sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Dari sisi penawaran, program pembukaan lahan pertanian oleh pemerintah pusat diperkirakan mampu mendorong produksi pangan domestik. Hal ini didukung oleh prakiraan cuaca yang lebih baik dan selesainya pembangunan Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto yang diharapkan mampu meredam potensi bencana banjir di sentra produksi pangan. Selain itu, melalui Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/kPTS/SR.310/M.11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2025 diharapkan mampu mendorong penyerapan pupuk subsidi sehingga dapat meningkatkan produktivitas produksi komoditas pertanian. Ketiga hal tersebut diperkirakan dapat menjaga stabilitas inflasi khususnya inflasi *Volatile Food* pada tahun 2025.

Di sisi lain, kebijakan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) rokok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 96 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan No 97 Tahun 2024 diperkirakan dapat mendorong inflasi. Selain itu, Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 diperkirakan juga berpengaruh terhadap gejolak inflasi *Administered Price* khususnya komoditas bensin pada tahun 2025. Walaupun demikian, prakiraan harga minyak dunia yang lebih rendah

yang didorong oleh kebijakan ekspansif Amerika Serikat dalam produksi energi fosil diperkirakan mampu menahan gejolak harga komoditas bensin pada tahun 2025. Selanjutnya, terdapat pula risiko kenaikan inflasi akibat berakhirnya kebijakan diskon tarif PAM pada Agustus 2025.

Inflasi Provinsi Aceh pada 2025 diperkirakan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2024. Walaupun demikian, berbagai program yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh seperti GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) terus dilakukan untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan terkendali. Selanjutnya, strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) terus digalakkan dalam rangka mengendalikan inflasi agar tetap berada pada sasaran $2,5\% \pm 1\%$.

7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

- 1. Mendorong peningkatan investasi dari luar Aceh dengan kemudahan proses perizinan, kepastian keberlangsungan investasi, dan penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai.** Peningkatan investasi khususnya dalam bentuk *direct investment* dari luar Aceh, baik domestik maupun internasional, yang akan memberikan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi Aceh dalam jangka panjang karena penciptaan lapangan pekerjaan baru. *Direct Investment* merupakan investasi dalam bentuk riil yang dapat berupa pabrik, fasilitas distribusi, toko, maupun kantor cabang baru. Peningkatan investasi dapat dilakukan dengan kegiatan promosi Aceh sebagai destinasi investasi dengan tingkat keamanan tinggi, iklim investasi yang kondusif dan didukung dengan kemudahan proses dari awal perencanaan hingga realisasi investasi. Peningkatan juga patut didukung dengan jaminan hukum akan keberlangsungan investasi dan dengan dukungan infrastruktur pendukung yang memadai seperti akses jalan, listrik, dan air bersih.
- 2. Memperkuat peran Satgas percepatan investasi atau *Regional Investment Relations Unit (RIRU) Aceh*.** Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan keterlibatan investasi swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini, peran Satgas percepatan investasi menjadi penting dan perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi proyek *clean and clear*, mengikuti *event* promosi investasi, memetakan calon investor potensial, serta memperkuat peran media dalam memperkenalkan proyek-proyek investasi kepada calon investor potensial.
- 3. Diversifikasi sumber pertumbuhan dengan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sektor potensial.** Sebagai provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, perekonomian Aceh masih didominasi oleh aktivitas ekonomi yang bergantung pada SDA dan bersifat ekstraktif, tingkat produksi yang fluktuatif dan bernilai tambah rendah, LU Pertanian dan LU Pertambangan secara total berkontribusi terhadap 39,27% dari total PDRB Aceh. Penciptaan sumber pertumbuhan baru akan mengurangi ketergantungan ekonomi Aceh terhadap kedua sektor fluktuatif tersebut. Penciptaan sumber pertumbuhan baru dapat dilakukan melalui sektor-sektor potensial Aceh yang memiliki *multiplier effect* yang besar seperti sektor pariwisata dan industri pengolahan.
- 4. Mendorong pengembangan dan implementasi *green economy* dan hilirisasi sektor pertanian dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh.** *Green Economy* adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, atau juga dapat diartikan sebagai aktivitas

- perekonomian yang sedikit atau tidak menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Adapun pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau mencakup penerapan *Good Agricultural Practices*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan, serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai nilai, dukungan kemitraan dan permodalan, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan di Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala, dan karet. Selain dari itu, hilirisasi sektor pertanian juga turut didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan resiliensi petani supaya tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas primer. Hilirisasi sektor pertanian juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru akibat penambahan proses pengolahan komoditas primer menjadi barang sekunder.
5. **Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMI di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan dan mendorong peningkatan nilai tambah UMKM.** Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang potensial dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2025. Penyaluran KUR dan UMI tentunya harus turut diiringi dengan pengembangan kapabilitas UMKM yang terlibat, khususnya pada literasi keuangan dan pembukuan. Dalam hal ini, digitalisasi sistem pembayaran menggunakan QRIS dan Mesin POS (*Point-of-Sales*) juga akan mempermudah pelaku usaha dalam proses pembukuan dan pencatatan keuangan usaha. UMKM dengan pencatatan dan pembukuan keuangan yang baik tentunya akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan untuk memperluas usahanya.
 6. **Mengakselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.** Sebagai daerah yang memiliki kekhususan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek, termasuk ekonomi, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Aceh cukup besar. Namun, potensi yang besar tersebut dinilai belum dioptimalkan dengan baik. Diperlukan perhatian khusus serta kolaborasi antar pemangku kebijakan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, dan ekonomi pesantren.
 7. **Memperkuat peran Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di setiap daerah** untuk mendukung ekosistem keuangan digital di Aceh. Transaksi non tunai/digital diharapkan dapat menjaga *demand* masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar. Transaksi non tunai/digital juga diperkirakan akan terus meningkat pasca pandemi sebagai penopang pemulihan ekonomi daerah. Di lingkungan Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) juga perlu diakselerasi melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perbankan, serta pihak terkait lainnya.

Inflasi

Pada tahun 2025, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan langkah antisipatif yang bersifat struktural maupun *seasonal* untuk mengendalikan inflasi agar berada pada sasaran yang ditetapkan $2,5\% \pm 1\%$. TPID Provinsi Aceh secara konsisten melakukan berbagai program pengendalian inflasi yang mengacu pada strategi 4K, antara lain:

1. **Ketersediaan Pasokan** antara lain melalui aktivitas peningkatan produksi di daerah sentra dengan optimalisasi *Good Agriculture Practices*, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan, penerapan *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, pemberian bantuan sarana prasarana di sisi hulu untuk mendukung peningkatan

produksi dan menjaga pasokan, serta mengakselerasi program KAD untuk komoditas pangan strategis antara daerah sentra dan non sentra.

2. **Keterjangkauan Harga melalui stabilisasi harga pangan strategis yaitu,** dengan melanjutkan program sinergi operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan di lokasi dan *timing* yang tepat. Di samping itu, melaksanakan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk komoditas pangan yang bergejolak (*volatile food*).
3. **Kelancaran Distribusi melalui peningkatan konektivitas antar daerah.** Peningkatan konektivitas antar daerah untuk mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan diantaranya dilakukan melalui pemanfaatan tol laut, fasilitasi kerjasama UMKM pangan dengan *e-commerce*, dan optimalisasi pemanfaatan *cold storage* untuk komoditas perikanan.
4. **Komunikasi Efektif melalui peningkatan akses informasi serta transparansi terkait harga antar daerah, peningkatan kapasitas dan koordinasi TPID Provinsi dan Kab/Kota, serta penguatan pengendalian ekspektasi inflasi.** Peningkatan akses informasi serta transparansi terkait harga antar daerah yakni, dengan pemanfaatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) sebagai referensi dalam rekomendasi kebijakan, Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan koordinasi dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota, pelaksanaan *High Level Meeting* TPID, dan pelaksanaan *Capacity Building* TPID. Terakhir, pengendalian ekspektasi inflasi dilakukan dengan bersinergi dengan media dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat.
5. **Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh** secara garis besar terdiri dari program jangka pendek (*quick wins*) dan program jangka panjang (*long term*). Program *quick wins* berupa kerjasama antar daerah (KAD) dan operasi pasar/pasar murah. Sementara itu,

program *long-term* diarahkan untuk ketahanan pangan dalam bentuk pengembangan kluster pangan. Selain itu, terdapat program komunikasi dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) seperti belanja bijak berbelanja maupun himbauan pemanfaatan sumber pangan alternatif dalam rangka diversifikasi pangan.

6. **Mendorong penguatan ketahanan pangan Aceh.** Penguatan ketahanan pangan ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan kelompok tani agar produktivitas kelompok meningkat dan memiliki daya tawar yang kuat dalam menentukan harga jual komoditas pangan. Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui optimalisasi peran BUMDes/Koperasi maupun unit usaha milik daerah lainnya sebagai lembaga *buffer* yang dapat menyerap *over supply* produksi pangan maupun menyerap komoditas pangan dari daerah (kab/kota ataupun provinsi) ketika terjadi kelangkaan pada produksi domestik. Upaya memperkuat kualitas data pangan untuk mendukung Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang lebih optimal dan optimalisasi pembuatan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pemetaan rantai pasokan pangan mulai dari produsen hingga pedagang. Terakhir, penguatan pangan dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi pangan melalui pembiayaan sektor pangan yang mendukung ketahanan pangan.

DAFTAR ISTILAH

Administered prices	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perceived risk	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Volatile food	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Agus Chusaini

KOORDINATOR PENYUSUN

Hendy Hadiyan

TIM PENULIS

Hafidz Yudhansyah

Imam Wahyudi

Muhammad Raziq Ilmi

Kristina Panduwinata

Hana Nabillah

Irfan Bagus Rachmanto

Hafidz Bramandito

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

JL. Cut Mutia No.15, Banda Aceh

Telp. (0651) 32320 ext. 8205 | Fax. (0651) 34116

Softcopy dapat diunduh pada tautan:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Aceh-Mei-2025.aspx>.